GOTONG ROYONG
BEKERJA DENGAN HATI

Bumi Luwes Sanggau

1. PINTAR
2. SEHAT
3. BERSIH DAN INDAH
4. TERTIB
5. TERANG
6. MANJUR (MAJU INFRASTRUKTUR)
7. BUDIMAN (BERBUDAYA & BERIMAN)

SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN
BAIK UNTUK SEMUA

KABUPATEN SANGGAU

DINSOSP3AKB
KABUPATEN SANGGAU

RENJA
PERUBAHAN
TAHUN 2024

Bersama
Mewujudkan Keluarga
Sejahtera

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Rancangan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Pada prinsipnya Rancangan Renja Perubahan merupakan Dokumen Acuan Operasional pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 yang dalam penyusunannya berdasarkan hasil evaluasi anggaran semester pertama taman 2024 dan dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh Unit-unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 merupakan pelaksanaan teknis selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Kami menyadari bahwa Rancangan Rencana Kerja ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Rancangan Renja Perubahan ini masih jauh dari sempurna, tetapi kami berharap Rancangan Renja Perubahan ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya Semoga Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan bagi peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak an Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau "**Pelayanan Sosial yang Berkualitas dan Berkeadilan, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menuju Keluarga yang Sejahtera"**.

Sanggau, 5 Agustus 2024
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sanggau

Drs. ALOYSIUS YANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640909 199412 1003

DAFTAR ISI

KataPengantar..... i

Daftar Isi..... ii

BAB I **Pendahuluan** 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 DAN CAPAIAN KINERJA** 8

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau Tahun lalu dan capaian Renstra Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau 8

2.2 Analis kinerja pelayanan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau 68

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau. 71

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 73

2.5 Penelaahan usulan progran dan kegiatan masyarakat 102

BAB III **Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan** 104

3.1 Perubahan Renja Tahun 2024 113

3.2 Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan dan Pagu Perubahan Anggaran Renja DINSOSP3AKB Tahun 2024 131

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024 133

BAB IV **Penutup** 164

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diketahui bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja untuk tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan istilah Renja merupakan dokumen perencanaan yang perangkat daerah dengan terlebih dahulu mengevaluasi realisasi target kinerja tahun sebelumnya dan melakukan proyeksi untuk tahun berikutnya. Dalam kenyataannya dokumen Renja haruslah seiring sejalan dengan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen referensi perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian dokumen Renja mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja merupakan cikal bakal dari Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dokumen Renja adalah acuan ketika menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dokumen Renja idealnya juga disusun dengan kajian terhadap dokumen Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga serta dokumen Rencana Kerja Provinsi sehingga apa yang dilaksanakan di Kabupaten Sanggau linier dan memiliki kolerasi dengan program nasional dan program provinsi sehingga formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah memiliki sinergisitas sehingga memberikan ruang akselerasi implementasi kebijakan pembangunan berazaskan keadilan demi kesejahteraan seluruh rakyat di

Kabupaten Sanggau. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja berada pada posisi yang sangat penting bagi perangkat daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menyusun dokumen Rencana Kerja untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak serta keluarga berencana menuju keluarga yang sejahtera.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya

Dalam melaksanakan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau 2019-2024 yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019.

RPJMD yang memuat : visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sanggau telah melaksanakan

penyusunan Rencana Strategis 2019-2024 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sanggau. Renstra yang telah ditetapkan ini akan dijadikan sebagai bahan perumusan rancangan untuk menyusun Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan berfungsi sebagai koridor perencanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 ini memuat informasi tentang Sasaran, indikator kinerja, target pencapaian kinerja, kebutuhan Pagu indikatif, sumber dana dan prakiraan maju rencana tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonessia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Stándar Teknis Pelayanan Dasar pada Stándar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari kekerasan berbasis Gender dalam Bencana.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Stándar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikas, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata cara Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya dokumen Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini adalah untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat target kinerja, realisasi dan proyeksi. Tujuan disusunnya dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 antara lain :

1. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
2. Memberikan panduan dalam rangka membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau dalam mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
3. Menyajikan dokumen sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.

1.3.2.TUJUAN

Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 diantaranya :

a. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan.
b. Memberikan panduan dalam rangka membantu perangkat daerah mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan.
c. Menyajikan dokumen sebagai salah satu referensi dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA RENJA

Sistematika Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Analisis kinerja Pelayanan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOSP3AKAB KABUPATEN SANGGAU
BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan untuk menemukan dan memecahkan permasalahan dalam bentuk rekomendasi. Dengan melakukan evaluasi akan ditemukan kekeuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam implementasi kebijakan yang dalam hal ini terkait dengan target realisasi baik dari sisi serapan anggaran maupun kinerja perangkat daerah Dinsosp3akab.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau 2019-2024 dimana Tahun 2024 merupakan Tahun terakhir atau tahun penutup dari RPJMD 2019-2024. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam perencanaan sehingga meningkatkan efektivitas dan produktivitas sehingga kita dapat mengetahui tingkat kemajuan suatu kegiatan, tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuan serta hal-hal yang harus dilakukan dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memperoleh masukan dalam bentuk rekomendasi dalam rangka memberikan masukan bagi proses dan tahapan kebijakan kedepan sehingga menjadi lebih berkualitas dan berintegritas.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Dinsosp3akb. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau pada Tahun 2024 memuat 15 (Lima Belas) program dan 35 (tiga puluh lima) dan 116 (Seratus Enam Belas) Sub kegiatan. Pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa sesuai hasil pemetaan untuk tahun 2023 Sub kegiatan yang termasuk dalam SPM wajib untuk di anggarkan, jadi ada 17 (tujuh belas) penambahan sub kegiatan baru terkait SPM pada tahun anggaran 2023. Penambahan anggaran terjadi pada saat APBD pergeseran sebelum APBD Perubahan, dimana penambahan tersebut berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 2.222.816.839 dimana Dana Insentif Daerah ini di pergunakan untuk Bidang Fakir Miskin sebesar Rp. 1.625.317.519 pagu ini di peruntukan Rumah Tidak Layak Huni serta Belanja bantuan peralatan kerja sedangkan sisanya sebesar Rp. 597.499.680, dipergubakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk penanganan Audit Kasus Stunting. Belanja Langsung , Belanja DAK dan DID dengan rincian Realisasi sebagai berikut:

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	17.861.418.796,-	20.084.234.765,-	4.831.245.283,-	24,05
TOTAL		17.861.418.796,-	20.084.234.765,-	4.831.245.283,-	24,05

Tahapan berikutnya diuraikan rangkaian pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian PPKS

Sasaran 1 ditunjang dengan 6 (Enam) program yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Didukung dengan 8 (Delapan) kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal. Berikut capaian kinerja sasaran 1 tersaji pada tabel :

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kemandirian PPKS	**Indikator keluaran : Persentase PPKS yang mandiri**	**20,00%**		
	Program Pemberdayaan Sosial	**96,90 %**	**96,90%**	**100 %**
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	4 Lembaga	4 Lembaga	100 %
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	**100 %**	**100%**	**100 %**
	Kegiatan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	200 Orang	200 Orang	100%

	Program Rehabilitasi Sosial	**100 %**	**100%**	**100 %**
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	2978 Orang	2978 orang	100%
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**100 %**	**100%**	**100 %**
	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	628 Orang	628 Orang	100 %
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%
	Program Penanganan Bencana	**100 %**	**100%**	**100%**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1200 orang	1200 orang	100%
	Program Pengelolaan	**100 %**	**100 %**	**100 %**

	Taman Makam Pahlawan			
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	3 TMP	100%

Indikator Kinerja Sasaran strategis 1 ini adalah :

- Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
- Tingkat Angka Kemiskinan

Sedangkan untuk indikator program pada sasaran 1 ini adalah

1. Program Pemberdayaan Sosial

Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan. Realisasi capaian indikator program Pemberdayaan Sosial adalah 96,90%. Yang berarti terpenuhinya semua target capaian yaitu terbinanya potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yang bertujuan meningkatkan Kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Sanggau. Untuk program Pemberdayaan Sosial didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina dengan target kinerja 16 orang TKSK.
- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Lembaga sosial yang dibina dengan target kinerja 4 (empat) Lembaga sosial setiap tahunnya.

  Kelembagaan Kesejahteraan Sosial memiliki indikator program yaitu Persentase Lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina yang hanya memiliki satu kegiatan adalah Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial dengan indikator Keluaran Jumlah Lembaga Sosial yang mendapat pembinaan, sasaran kegiatan kelembagaan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten sanggau dengan target

kinerja tahun 2020 sebanyak empat lembaga. Berkaitan dengan aspek pembinaan terhadap keberadaan kelembagaan sosial seperti Karang Taruna, Yayasan Sosial termasuk didalamnya juga sinergi pemberdayaan TAGANA. Sampai dengan Tahun 2022 terdapat 160 Karang Taruna dan 10 Yayasan Sosial di Kabupaten Sanggau.

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, realisasi capaian indikator program ini adalah 100%. Yang berarti terpenuhinya semua target capaiannya yaitu 100%. Adapun indikator dari program tersebut adalah persentase warga negara migran yang terfasilitasi. Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan orang memiliki indikator keluaran yaitu jumlah pekerja eks migran/orang terlantar/trafficking yang tertangani dengan target sebanyak 200 orang selama satu tahun, adapun yang menjadi sasaran kinerja yaitu pekerja eks migran dan orang terlantar yang ada di Kabupaten Sanggau dan menjadi Tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Indikator hasil dari kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan orang yaitu Terpenuhinya jumlah pekerja eks migran/orang terlantar/ Trafficking yang tertangani.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator program adalah persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terfasilitasi dengan target kinerja sebesar 100% dengan realisasi capaian indikator program sebesar 100% yang berarti terpenuhinya semua target capaian yaitu penyediaan permakanan, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat serta pemberian layanan rujukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

- Penyediaan Permakanan

Indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan sosial. Lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan sosial adalah lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan dan kehidupannya berada pada garis kemiskinan. Lanjut usia terlantar ini mendapat kan bantuan langsung yang difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan sosial tersebut dapat meringankan kehidupan lansia tersebut. Untuk target kinerja Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar memiliki target sebanyak 535 orang lanjut usia terlantar. Dengan indikator hasil dari kegiatan adalah Terpenuhinya jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh kebutuhan dasar dengan target 100%.

- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat.

  Fasilitasi Penerima Bantuan Sosial memiliki sasaran kegiatan yaitu Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Sanggau. Jumlah penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas 245 orang untuk tahun 2022, berupa bantuan dana yang bersifat stimulan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Bantuan sosial yang diberikan 1 (satu) kali pertahun sejumlah Dua Juta Rupiah (Rp.2.000.000) serta bantuan sembako sejumlah 100 paket bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sanggau. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini dibantu Tenaga kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertanggung jawab di tiap kecamatan berjumlah 16 orang.

- Pemberian Layanan Rujukan

  Dengan indikator sub kegiatan yaitu 186 orang dengan gangguan jiwa yang ada di Kabupaten Sanggau. Penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan di fasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau untuk mendapatkan perawatan medis secara langsung di

Rumah Sakit Jiwa Kota Singkawang dengan bantuan pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Fasilitasi penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan memiliki indikator keluaran yaitu Jumlah Orang yang sudah tertangani dengan indikator hasil Terpenuhinya orang dengan gangguan jiwa yang ditangani. Diharapkan dengan adanya kegiatan Fasilitasi penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat memberikan kemudahan pada orang dengan gangguan jiwa yang memiliki keterbatasan biaya untuk berobat dapat difasilitasi hingga kembali pulih. Fasilitasi yang diberikan berupa melengkapi dokumen kependudukan serta syarat lainnya dalam rangka mengusulkan ODGJ mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta PBI –ABPD, hingga fasilitasi ODGJ mendapatkan layanan perawatan dan pengobatan hingga resosialisasi ODGJ layak pulang ke keluarga.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator program adalah Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dengan target kinerja 90% dengan realisasi capaian program sebesar 90% yang berarti terpenuhinya semua target capaian pada 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar dengan satu sub kegiatan yaitu Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar dengan target indikator kinerja 9 Panti Asuhan yang mendapat pembinaan dan memberikan pelayanan kesehatan.

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun dengan target 2 Dokumen dalam satu tahun.

- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memiliki Indikator Kinerja Program/Kegiatan yaitu Tersedianya Data Kemiskinan Kabupaten Sanggau dengan sasaran kegiatan yaitu jumlah penduduk miskin sebanyak 125.412 Penduduk Miskin (data ini bersifat fluktuatif tergantung hasil

verifikasi dan validasi data DTKS melalui aplikasi SIK-NG. Pendataan penduduk miskin merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah dikarenakan data ini akan menjadi tolak ukut untuk pelaksanaan bantuan sosial pemerintah pusat dan daerah serta titik tolak untuk pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat.

Kegiatan pendataan penduduk miskin akan disinkronisasikan dengan data administrasi kependudukan. Untuk itu, maka telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara DINSOSP3AKB dengan DISDUKCAPIL Kabupaten Sanggau. Untuk pelaksanaan Pendataan Penduduk Miskin, juga bersinergi dengan pihak desa dan kelurahan melalui pemanfaatan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan dan perbaikan data penduduk miskin. Langkah yang sudah diambil adalah dengan memanfaatkan anggaran Dana Desa untuk membiayai Honorarium Petugas Operator Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data melalui program SIK-NG. Data kemiskinan harus selalu diupdate agar bantuan sosial dan jaminan kesehatan tepat sasaran dan tepat penerima.

- Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 1 Dokumen. Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau dituangkan dalam Aplikasi SIDOMPU, dengan adanya aplikasi SIDOMPU memberikan kemudahan dalam hal memverifikasi data kependudukan melalui nomor induk kependudukan sehingga hasil verifikasi tersebut akan dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahtreraan Keluarga

  Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target kinerja 5 Jenis Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat yaitu Bantuan Kube, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Sarana Lingkungan, Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Program Keluarga Harapan.
  - Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai memiliki indikator kinerja program/kegiatan adalah Terlaksananya distribusi Rastra kepada penerima manfaat sebanyak 9.770 Keluarga

penerima manfaat (KPM) dengan tingkat harga dan jumlah yang telah ditentukan pemerintah. Dengan sasaran kegiatan sebanyak 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Indikator hasil dari kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya Distribusi Subsidi beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai sendiri Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bekerjasama dengan Bulog untuk penyaluran Beras kepada Keluarga Penerima Manfaat serta bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku Pihak Himbara (Himpunan Bank Negara) yang tersebar dibeberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau, selain itu kegiatan ini juga bekerjasama dengan supplier pihak ketiga yang turut membantu dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai tersebut berupa komoditi telur dan sembako. Penyaluran BPNT ini sendiri dilakukan menggunakan E-Warong untuk beberapa kecamatan yang telah memiliki jaringan internet sehingga dapat memudahkan keluarga penerima manfaat dalam menerima Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2020 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berubah nama menjadi Program Bantuan Sembako dengan jumlah bantuan sebesar Rp.150.000,00 yang diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat Berupa beras, telur serta protein hewani dan Protein Nabati.

- Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan. Program Keluarga Harapan ini memiliki sasaran Keluarga Penerima Manfaat pada tahun 2020 berjumlah 7.901 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan mempunyai Sumber Daya Manusia yang disebut pendamping PKH di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau yang bertugas

mendampingi KPM PKH. Program Keluarga Harapan ini bersentuhan langsung kepada masyarakat karena bantuan diterima oleh KPM melalui transfer yang dikirim ke masing-masing rekening KPM PKH. Adapun yang menjadi indikator keluaran kegiatan Program Keluarga Harapan adalah Jumlah keluarga penerima manfaat serta yang menjadi Indikator Hasil adalah Terpenuhinya Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan. Besarnya bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat tidak sama dikarenakan setiap keluarga penerima manfaat memiliki kebutuhan yang berbeda.

- Rumah Tidak Layak Huni ini dilaksanakan salah satu tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2024 target 79 RTLH yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah.

- Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan target kinerja 6 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam satu tahun anggaran. Dengan indikator anggaran Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan.

5. Program Penanganan Bencana

Penanggulangan korban bencana memiliki sasaran kegiatan yaitu Korban bencana yang mana indikator keluaran kegiatan tersebut adalah jumlah Penerima Bantuan Bencana serta indikator Hasilnya berupa Terpenuhinya jumlah penerima bantuan Bencana yang ditangani yang memiliki target kegiatan sebanyak 300 korban bencana selama setahun. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban musibah bencana alam seperti banjir, kebakaran dan tanah longsor serta bencana sosial seperti kerusuhan, konflik sosial dan sebagainya. Bantuan yang diberikan berupa sandang dan pangan yang diharapkan dapat sedikit meringankan beban korban yang tertimpa musibah.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawana memiliki sasaran kegiatan Taman Makam Pahlawana yang memilliki target kinerja selama setahun adalah Tiga Taman Makam Pahlawan yang dipeliharan. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawanan ini juga diperuntukan untuk kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Ada 3 TMP yang harus dipelihara di Kabupaten Sanggau yaitu TMP Patriot Bangsa, TMP Pangsuma Meliau dan TMP Temenggung Gergaji Sekayam. Kegiatan ini perlu dukungan pembiayaan agar TMP tidak lagi dianggap lokasi yang kurang baik namun diarahkan bisa dijadikan sebagai lokasi wisata.

Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak

Sasaran 2 memiliki dua inkator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA), ditunjang dengan 5 (Lima) Program yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); Program Perlindungan Khusus Anak dikdukung dengan 11 (sebelas) kegiatan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota; Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota; Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota Bidang Pemberdayaan Perempuan. Pengumpulan, pengolahan

analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota; Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota; Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota; Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota; Bidang Perlindungan Anak. Berikut capaian Kinerja sasaran 2 tersaji pada tabel :

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	**Indikator: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)**	**61,65** **Madya**	**61,65** **Pratama**	**100%** **50%**
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	**100 %**	**100%**	**100%**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	100%

	kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dok	4 Dok	100%
	Program Perlindungan Perempuan	**100 %**	**100%**	**100%**
	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota	3 Perangkat Dearah	3 Perangkat Dearah	100%
	Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	25 Kasus	25 Kasus	100%
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

	perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota			
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	**100 %**	**100%**	**100%**
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	3 Dok	3 Dok	100%
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**70 %**	**70 %**	**100 %**
	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100%
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan	33 Lembaga	33 Lembaga	100%

	kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota			
	Program Perlindungan Khusus Anak	**100%**	**100%**	**100%**
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%
	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	2 Dok	2 Dok	100%

Dari sasaran strategis Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender merupakan sasaran strategis kedua dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2019-2024. Sasaran strategis ini mempunyai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta Indeks pembangunan Gender yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas. Sasaran strategis meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender memiliki Lima program yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator capaian program Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun dengan target indikator program 100%. Yang didukung oleh satu kegiatan yaitu kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota dan satu sub kegiatan yaitu Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

   Dokumen Indikator Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dengan indikator Hasil adalah Terpenuhinya penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Pada tahun 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau akan mengikuti kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Untuk dapat memperoleh penghargaan tersebut ada tujuh syarat Perencanaan Pengaggaran Responsif Gender (PPRG) dalam melaksanakan PUG. Adapun ketujuh prasyarat tersebut adalah :

No.	Komponen	Pelaksanaan
1.	Komitmen	Pejabatpengambil keputusan (peraturan tentang pelaksanaan PUG Pusat dan Daerah)
2.	Kebijakan	Adanya RPJMN/RPJMD yang responsive Gender
		Renstra Kementerian/Renstra Eselon 1/SKPD/OPD, Juklak, Juknis.
3.	Kelembagaan (Lembaga)	Adanya Pokja PUG (termasuk 6 Focal Point PUG)
		Adanya rencana tahunan Pokja PUG
		Adanya Laporan Tahunan Pokja PUG
4.	a. Sumber Daya Manusia	Tersedianya SDM yang telah mengikuti pelatihan (capacity buiding PUG/PPRG

		Tersedianya SDM yang sudah mengikuti TOT Fasilitator PUG/PPRG.
	b. Sumber Daya Anggaran	Adanya alokasi anggaran untuk (capacity buiding) PUG/PPRG
		Adanya ARG
5.	Alat Analisis Gender	Alat analisis gender yang digunakan (GAP, Harvard, dll)
6.	Data Gender	Tersedianya Statis gender/Profil gender/data terpilah.
7.	Peran serta masyarakat	Adanya lembaga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PUG

Untuk mendapat kan Anugrah Parahita Ekaparaya, maka ketujuh komponen tersebut harus terpenuhi.

penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam pembangunan memiliki sasaran kegiatan yaitu kaum perempuan Desa Fokus, Kampung KB, dan Desa Sampel KSI. Indikator keluaran darai kegiatan tersebut adalah Jumlah kaum perempuan Desa Fokus, Kampung KB dan Desa Sampel KSI yang mengikuti penyuluhan, Indikator hasilnya adalah Terpenuhinya kaum perempuan yang mengikuti penyuluhan. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari komitmen yang tinggi dalam rangka peran perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak bisa lepas dari peran ibu rumah tangga, maka dari itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tetap melakukan penyuluhan untuk kemandirian menuju keluarga sejahtera. Untuk Kabupaten Sanggau sendiri kegiatan penyuluhan ibu rumah tangga untuk membangun keluarga sejahtera dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan seperti pembuatan olahan bahan pangan lokal sehingga dapat memiliki daya manfaat yang tinggi, sehingga dapat memberikan keterampilan bagi kaum perempuan terutama ibu rumah tangga yang di Desa Fokus, Kampung KB dan Desa Sampel KSI. Penyuluhan yang diberikan kepada Kaum perempuan khususnya

ibu rumah tangga dengan target sebanyak 240 orang ibu rumah tangga selama satu tahun. Pada tahun 2019 kegiatan tersebut terealisasi besesar 94,28 %.

pemberdayaan Gender (IDG) dengan target sebesar 61,35 % sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengn target 80,55 %. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan memiliki 6 kegiatan untuk menunjang target capaian kinerja diatas. Indeks pembangunan Gender atau biasa yang dikenal dengan IPG adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila angka IPG sama dengan IPM. Apabila angka IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat dilihat dari selisih antara IPM dan IPG, semakin kecil selisih antara IPM dan IPG maka dapat diartikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau memiliki enam kegiatan guna menunjang pertumbuhan IPG dan IDG.

pembinaan organisasi perempuan memiliki sasaran kinerja yaitu Organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sanggau dengan target kinerja sebanyak 40 Organisasi perempuan yang mendapat pembinaan. Adapaun yang menjadi indikator keluaran darin kegiatan tersebut adalah jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan dan yang menjadi indikator hasil dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya organisasi perempuan yang mendapat pembinaan. Adapun yang menjadi tujuan

diselenggarakannya kegiatan pembinaan organiasi perempuan adalah

a. Meningkatnya komitmen organisasi perempuan dalam program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
b. Meningkatnya kapasitas penguatan kelembagaan dan jejaring untuk optimalisasi pelaksanaan dibidang peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Sanggau.

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan pembinaan organisasi perempuan adalah menggugah partisipasi perempuan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dengan ikut ambil bagian dalam kemajuan pembangunan.

2. Program Perlindungan Perempuan

Program perlindungan Perempuan memiliki indicator program yaitu Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani dengan target kinerja program sebesar 100%. Program tersebut memilki tiga kegiatan yaitu Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan satu sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota, Kegiatan Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota dengan satu sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota; kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota didukung satu sub kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Tujuan dari program tersebut adalah untuk meminimalisir dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga perempuan terlindungi dan mendapat pendampingan hukum.

3. Program Pengelolaan Data Gender dan Anak

   Program Pengelolaan Data Gender dan Anak memiliki indicator program yaitu Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik yang didukung oleh satu kegiatan yaitu Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota. Dan satu sub kegiatan yaitu Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

   Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) memiliki indikator program yaitu Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota yang didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota, dan kegiatan yang ke dua yaitu kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota yang didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota dan Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

   Program Perlindungan Khusus Anak memiliki indikator Program yaitu Persentase kasus kekerasan anak tertangani yang didukung oleh dua kegiatan yaitu Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota. Dan kegiatan yang ke dua yaitu kegiatan Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan

khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota yang didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan yaitu Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota, Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak dengan sasaran kegiatan kepala desa, kepala dusun, Tokoh Masyarakat, Guru, PKK Desa dan anak-anak. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak ini bertujuan untuk menurunkan angka kekerasan dan pencabulan terhadap anak serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Untuk tahun 2022 ada tujun desa yang menjadi target kinerja kegiatan, dengan capaian kinerja sebanyak 83,03 %. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak bertsentuhan langsung pada anak korban kekerasan atau pencabulan, sehingga anak korban kekerasan atau pencabulan mendapat perlindungan hukum yang langsung difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau hingga proses hukumnya selesai. Indicator keluaran dari kegitan tersebut adalah jumlah peserta sosialisasi terkait perlindungan anak dengan indikator hasil Terpenuhinya Desa yang telah berkomitmen layak anak.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keberhasilan Ber KB

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Keberhasilan Ber KB	**Indikator : Total Fertility Rate**	**2.21**	**2.21**	**100%**
	Program Pengendalian Penduduk	**2.22 Point**	**2.22 Point**	**100 %**
	Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	3 Dok	3 Dok	100%
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**71,23 %**	**65,00 %**	**91,25 %**

	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	6 Dok	6 Dok	100%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	15 Orang	15 Orang	100%
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	33 Faskes	33 Faskes	100%
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	4 Dok	4 Dok	100%

	dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB			
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**71,04 %**	**61,23 %**	**86,19 %**
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	12 Kelompok	12 Kelompok	100%
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Lap	1 Lap	100%

Dari sasaran strategis meningkatnya penduduk yang ber KB memiliki sasaran indikator yaitu Total Fertility Rate dengan target 2,24 pertahun. pada sasaran strategis ini memiliki empat program dan memiliki delapan kegiatan untuk menunjang guna tercapainya Total Fertility Rate. Total Fertility rate ialah istilah yang digunakan dibidang Demografi untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang terlahir dari seorang wanita sepanajng hidupnya bila ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik usia terkini yang pasti dan ia akan selamat dari kelahiran sepanjang reproduktifnya. Untuk target sasaran pada indikator sasaran strategis Total Fertility Rate adalah dengan treb angka yang menurun. Karena jika angka kelahiran menurun, maka Program Keluarga Berencana dianggap berhasil. Angka kelahiran menurut kelompok umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR), ASFR 15-19 sebesar 38 berarti bahwa dalamsatu juta wanita 15-19 tahun secara rata-rata mempunyai 38 anak selama usia suburnya. Adapun empat program yang dapat mendukung tercapaianya sasaran strategis tersebut adalah :

1. **Program Pengendalian Penduduk**

   Program Keluarga Berencana dengan indikator kinerja yaitu persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peseta KB Aktif dengan taget kinerja pada tahun 2021 sebesar 66,23%. Program keluarga Berencana memiliki enam kegiatan yang empat kegiatannya bersumber dari dana DAU dan dua kegiatannya bersumber dari Dana DAK. Program Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penaggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya. Untuk menunjang program keluarga berencana memiliki enam kegiatan, adapun kegiatan tersebut adalah:

1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk.

   Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan yaitu sub kegiatan penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK), Sub kegiatan penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan serta sub kegiatan Penguatan Kerjasama pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur pendididkan formal.

2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

   Kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota didukung oleh lima sub kegiatan, dimana kelima sub kegiatan ini yang akan mendukung tercapaianya indikator kinerja pada kegiatan tersebut, Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah :

   1. Membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integritas Program KKBPK disektor lain.
   2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan system informasi keluarga.
   3. Pencatatan dan pengumpulan data keluarga
   4. Pengelolaan dan peleporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB
   5. Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan Program KKBPK.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program pembinaan keluarga berencana (KB) memiliki 4 (empat) kegiatan, dimana keempat kegiatan tersebut ada

berasala Dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun keempat kegiatan tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

   Kegiatan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi KB sesuai kearifan budaya lokal memiliki lima sub kegiatan yang menunjang tercapaianya capaian kinerja pada kegiatan tersebut. Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah :

   1) Advokasi program KKBPK kepada Steakholders dan mitra kerja.
   2) Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan Elektronik serta media luar ruang.
   3) Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Mimilok).
   4) Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK.
   5) Pengendalian Program KKBPK.
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).

   Kegiatan Pendagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) didukung oleh satu sub kegiatan, dimana sub kegiatan tersebut di akomodir oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun sub kegiatan tersebut adalah sub kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP).
3. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota didukung oleh empat sub kegiatan untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun keempat sub kegiatan tersebut adalah:

1) Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontarsepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
2) Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
3) Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
4) Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.

4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

   Kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan dalam menunjang tercapaianya capaian kinerja program kegiatan. Adapun ketiga sub kegiatan tersebut adalah :

   1) Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
   2) Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB
   3) Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) didukung oleh 2 (dua) kegiatan. Adapun dua kegiatan tersebut adalah :

1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

   Kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga didukung oleh lima sub kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja program kegitan tersbut, dimana program kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung terhadap program penurunan Stunting. Dimana kegiatan ini didukung oleh lima sub kegiatan untuk dapat menunjang tercapainya target kinerja pada kegiatan tersebut, Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah:

   1) Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
   2) Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS).
   3) Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanandan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS).
   4) Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)

5) Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

   Kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga didukung oleh satu sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pendagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan Operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS).

   Adapun table Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau sebagai berikut:

BAB. II. I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sesuai Permendagri 90 tahun 2019

NO.	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Dinsosp3akb Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Dinsosp3akb Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinsosp3akb yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Dinsosp3akb Tahun 2019-2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Dinsosp3akb s/d 2023		Unit Dinsosp3akab Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				Target	Rp													Target	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Dinsosp3akb Kab. Sanggau		**Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan prima**																					**Kadis DINSOSP3AKB**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indikator Program : Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau**	**100%**	**5.397.911.135**	**100%**	**4.088.518.360**	**100%**	**4.885.712.881**	**25,52%**	**553.493.138**	**49,23%**	**2.244.011.202**		**-**		**-**	**49,23%**	**2.257.812.806**		**6.346.331.166**		**117,57**	**Sekretaris DINSOSP3AKB**
			Sasaran : Dokumen Renja, Renja Perubahan, Perubahan Renstra, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, LAKIP, RKT, TAPKIN, SPIP dan Rencana Aksi Dinsosp3akb Kab.Sanggau																					
2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**																					**Kasubbag Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB**
1.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	3 Dok	9.952.140	3 Dok	9.333.615	3 Dok	6.808.201	3 Dok	2.818.201	3 Dok	3.933.960		-		-	3 Dok	6.752.161		9.952.140	100	100,00	
			Indikator Hasil :Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%																				
2.		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Sebanyak 1 Dokumen	1 Dok	28.881.083	1 Dok	25.614.551	1 Dok	24.218.960	1 Dok	5.063.385	1 Dok	13.383.129					1 Dok	18.446.514		44.061.065		152,56	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Sebanyak 1 Dokumen																					
3		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang dokumen disusun Sebanyak 1 dokumen	1 Dok	5.480.271	1 Dok	6.979.689	1 Dok	2.861.580	1 Dok	-	1 Dok	4.280.055					1 Dok	4.280.055		11.259.744		205,46	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun																					

4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indikator keluaran : Jumlah DPA-SKPD yang disusun Sebanyak 1 Dokumen	1 Dok	5.999.922	1 Dok	5.110.131	1 Dok	2.947.050	1 Dok	-	1 Dok	133.200					1 Dok	133.200		5.243.331		87,39	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah DPA-SKPD yang disusun Sebanyak 1 Dokumen																					
5.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun Sebanyak 1 Dokumen	1 Dok	5.999.922	1 Dok	4.938.522	1 Dok	2.167.830	1 Dok	-	1 Dok	986.790					1 Dok	986.790		5.925.312		98,76	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun																					
6.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan SPIP yang disusun Sebanyak 2 Dokumen	2 Dok	5.101.002	2 Dok	6.809.934	2 Dok	3.530.100	2 Dok	-	2 Dok	-					2 Dok	-		6.809.934		133,50	
			Indikator Hasil :Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan SPIP yang disusun Sebanyak 2 Dokumen																					
7.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sebanyak 4 Dokumen	4 Dok	8.410.770	4 Dok	8.047.932	4 Dok	6.251.010	4 Dok	-	4 Dok	-						-		8.047.932		95,69	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sebanyak 4 Dokumen																					

2.02		**Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran :Gaji dan Tunjangan ASN, Tunjangan Kinerja ASN, Pelaksanaan Verifikasi, Pelaksanaan Akuntanasi dan SPJ, Laporan Keuangan Akhir Tahun,LHP, Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Prognosis realisasi Anggaran Dinsosp3akb Kab. Sanggau**																					**Kasubbag Keuangan dan Aset DINSOSP3AKB Kab. Sanggau**
			Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi																					
8.		Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksana Tugas ASN yang disusun	12 Bulan	3.399.771.578	12 Bulan	2.329.675.789	12 Bulan	3.056.232.548	12 Bulan	474.385.786	12 Bulan	1.388.401.209						1.323.095.461	12 Bulan	3.652.771.250		107,44	
			Indikator Hasil : Persentase Laporan Jumlah Laporan Pelaksana Tugas ASN yang disusun																					
9.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	12 Bulan	1.633.578.611	12 Bulan	1.480.789.368	12 Bulan	1.531.563.514	12 Bulan	-	12 Bulan	714.674.159						714.674.159	12 Bulan	2.195.463.527		134,40	
			Indikator Hasil : Persentase Laporan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi																					
10.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	1 Dok	212.438.912	1 Dok	165.270.909	1 Dok	179.359.161	1 Dok	40.596.036	1 Dok	84.561.747						125.157.783		290.428.692		136,71	
			Indikator Hasil : Persentase Laporan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi																					
11.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	1 Dok	59.484.453	1 Dok	30.791.518	1 Dok	50.199.720	1 Dok	14.043.450	1 Dok	21.535.096						35.578.546		66.370.064		111,58	
			Indikator Hasil : Persentase Laporan Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun																					
12.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indikator Keluaran :Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	1 Dok	5.413.914	1 Dok	3.034.545	1 Dok	2.975.555	1 Dok	-	1 Dok	-						-		3.034.545		56,05	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun																					
13.		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	1 Dok	3.822.093	1 Dok	2.747.505	1 Dok	9.789.401	1 Dok	9.780.198	1 Dok	2.747.505						12.527.703		15.275.208		399,66	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun																					

14.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	1 Dok	7.358.868	1 Dok	5.934.507	1 Dok	5.081.269	1 Dok	5.079.474	1 Dok	5.934.507						11.013.981		16.948.488		230,31	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun																					
15.		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun	2 Dok	6.217.596	2 Dok	3.439.845	2 Dok	1.726.982	2 Dok	1.726.608	2 Dok	3.439.845						5.166.453		8.606.298		138,42	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun																					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau**																					Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB
			Indikator Kegiatan : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai																					
16		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang disusun	2 Dok	6.280.424	2 Dok	6.280.182	2 Dok	6.012.537	2 Dok	-	2 Dok	6.280.182						6.280.182		12.560.364		199,99	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang disusun																					
17.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah yang disusun	2 Dok	11.141.380		10.495.530	2 Dok	9.019.112	2 Dok	-	2 Dok	1.734.930						1.734.930		12.230.460		109,78	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah yang disusun																					
18.		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	3 Dok	19.562.538	3 Dok	18.362.329	3 Dok	14.158.950	3 Dok	2.700.000	3 Dok	5.700.000						8.400.000		26.762.329		136,80	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun																					

		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Sasaran : PNS dan Non PNS DINSOSP3AKB**	63 Stel		63 Stel		63 Stel		63 Stel														**Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB**
			Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur																					
		Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Indikator Keluaran : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai																					**Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB**
19.		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dan pakaian khusus hari-hari tertentu	Indikator Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	63 Stel	29.370.600	54 Paket	28.890.000	54 Paket	-	54 Paket	-	54 Paket	-					-		28.890.000		98,36	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan																					
20.		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun	2 Dok	3.046.230	2 Dok	5.357.289	2 Dok	5.133.084	2 Dok	-	2 Dok	5.357.393					5.357.393		10.714.682		351,74	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun																					
21.		Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Indikator Keluaran :Jumlah Dokumen profil ASN Dinsosp3akab yang disusun	1 Dok	6.114.024	1 Dok	6.295.992	1 Dok	6.615.770	1 Dok	-	1 Dok	-					-		6.295.992		102,98	
			Indikator Hasil :Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen profil ASN Dinsosp3akab yang disusun																					
22		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang disusun	1 Dok	4.430.250	1 Dok	4.271.759	1 Dok	6.849.979	1 Dok	-	1 Dok	1.329.372					1.329.372		5.601.131		126,43	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Laporan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang disusun																					
23		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																					
			Indikator Hasil : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16 Orang	57.776.000	16 Orang	-	16 Orang	-	16 Orang	-		17.426.680					17.426.680		17.426.680		30,16	
24		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	-	35 Orang	-	35 Orang	4.096.602	35 Orang	-													
			Indikator Hasil : Terlaksananya Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan																					

		ADMNISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	22 Jenis		22 Jenis																		**Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB**
			Indikator Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan																					
23		Penyedian Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran : Jumlah Alat Listrik dan elektronik yang disediakan	5 Jenis	9.971.130	5 Jenis	6.117.210	5 Jenis	9.971.130	5 Jenis	-	5 Jenis	2.841.696					2.841.696		8.958.906		89,85	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Alat Listrik dan elektronik yang disediakan																				
24		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran :Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Jenis	203.595.190	10 Jenis	203.464.050	10 Jenis	83.902.400	10 Jenis	-	10 Jenis	110.554.000					110.554.000		314.018.050		154,24	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan																				
25.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator Keluaran : Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	45.431.980	12 Bulan	45.163.260	12 Bulan	30.902.400	12 Bulan	10.860.870	12 Bulan	9.471.070					20.331.940		65.495.200		144,16	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan																				
26.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indikator Keluaran :Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	29.035.513	8 Jenis	27.364.803	8 Jenis	28.518.786	8 Jenis	-	8 Jenis	7.642.800					7.642.800		35.007.603		120,57	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan																				
27.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Indikator Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3352 Eksemplar	9.088.000	3352 Eksemplar	8.700.000	3352 Eksemplar	9.996.800	3352 Eksemplar	2.175.000	3352 Eksemplar	3.805.000					5.980.000		14.680.000		161,53	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan																				
28.		Penyediaan bahan / Material	Indikator Keluaran : Jumlah BBM yang disediakan	4688 Liter	48.594.800	4688 Liter	32.388.000	4688 Liter	24.115.000	4688 Liter	6.498.390	4688 Liter	6.875.813					13.374.203		45.762.203		94,17	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah BBM yang disediakan																				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	3.600.000	12 Lap	-	12 Lap												
			Tersedianya Fasiltasi Kunjungan Tamu																				
29.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Keluaran :Jumlah Perjalanan Dinas ke luar Daerah	192 OH	228.299.000	192 OH	227.841.863	192 OH	46.425.000	192 OH	15.652.000	192 OH	10.092.800					25.744.800		253.586.663		111,08	
			Indikator Hasil :Jumlah Perjalanan Dinas ke luar Daerah																				
30.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indikator Keluaran :Jumlah Arsip Sekretariat dan Bidang yang disusun	5 Dok	5.345.494	5 Dok	5.345.115	5 Dok	8.430.209	5 Dok	-	5 Dok	1.354.320					1.354.320		6.699.435		125,33	
			Indikator Hasil :Persentase pemenuhan Jumlah Arsip Sekretariat dan Bidang yang disusun																				
31.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indikator Keluaran :Jumlah Arsip Sekretariat dan Bidang yang disusun	2 Dok	5.210.962	2 Dok	5.210.652	2 Dok	5.630.400	2 Dok	-	2 Dok	-					-		5.210.652		99,99	
			Indikator Hasil : Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																				

		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang diadakan**																					**Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB**
			Sasaran :Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau																					
32		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Keluaran : Jumlah Unit kendaraan Dinas operasional/lapangan yang disediakan	1 Unit	163.800.000	1 Unit	151.000.000	-	163.800.000	1 Unit	108.000.000	1 Unit	-					108.000.000		259.000.000		158,12	
			Indikator Hasil : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
33		Pengadaan Mebel	Indikator Keluaran : Jumlah Mebeleur yang diadakan	9 Jenis	40.653.750	9 Jenis	40.482.440	9 Jenis	126.563.140	9 Jenis	-	9 Jenis	-					-		40.482.440		99,58	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Mebeleur yang diadakan																					
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Indikator Keluaran :Jumlah benda pos yang disediakan untuk surat menyurat**																					**Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB**
			Sasaran :Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau																					
32.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : Jumlah benda pos yang disediakan untuk surat menyurat	256 Lembar	2.472.000	256 Lembar	2.472.000	256 Lembar	2.472.000	256 Lembar	-	256 Lembar	-					-		2.472.000		100,00	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah benda pos yang disediakan untuk surat menyurat																					
33.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Keluaran : Jumlah waktu penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	123.251.000	12 Bulan	92.912.052	12 Bulan	119.783.000	12 Laporan	22.323.939	12 Laporan	45.805.675					68.129.614		161.041.666		130,66	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah waktu penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik																					
34.		Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Keluaran : Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan	26 Jenis	123.557.320	26 Jenis	120.546.976	26 Jenis	125.387.332	26 Laporan	27.232.212	26 Laporan	57.290.828					84.523.040		205.070.016		165,97	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan																					

		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Indikator Keluaran : Jumlah kendaraan dinas perorangan/kendaaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar perizinannya**																					**Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB**
			Sasaran :Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau																					
35.		Penyedian Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Indikator Keluaran :Jumlah Kendaraan Dinas /Oprasional yang dibayar Perizinaannya	10 Unit	227.824.000	10 Unit	224.875.900	10 Unit	123.000.000	10 Unit	21.289.600	10 Unit	79.095.100					100.384.700		325.260.600		142,77	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Kendaraan Dinas /Oprasional yang dibayar Perizinaannya																					
36.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Indikator Keluaran :Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	94 Unit	29.600.000	94 Unit	29.600.000	94 Unit	54.071.190	94 Unit	15.000.000	94 Unit	9.000.000					24.000.000		53.600.000		181,08	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki																					
37.		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Paket	150.825.947	1 Paket	150.814.759	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Unit	-					-		150.814.759		99,99	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara																					
		Program Pemberdayaan Sosial	**Indikator Program : Persentase PMKS yang tertangani**																					
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Indikator Kegiatan : Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan																					
			Sasaran : Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK), LK3, LLI, Lembaga Sosial																					
41.		Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah TKSK yang dibina	16 Org	59.625.980	16 Org	59.580.980	16 Org	54.071.190	16 Org	15.000.000	16 Org	-					15.000.000		74.580.980		125,08	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah TKSK yang dibina																					
42.		Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga sosial yang dibina	4 Lembaga	52.540.460	4 Lembaga	51.792.976	4 Lembaga	40.599.880	4 Lembaga	5.530.896	4 Lembaga	13.719.558					19.250.454		71.043.430		135,22	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Lembaga sosial yang dibina																					

		PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Indikator Kegiatan : Persentase penyelesaian warga negara migran korban tindak kekerasan																					
		Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	**Indikator Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran yang di Fasilitasi**																					
			Sasaran : Warga Migran																					
44.		Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen pemulangan warga negara migran yang tertangani	1 Dok	36.390.076	1 Dok	35.498.576	1 Dok	18.039.078	200 Orang	9.460.000	200 Orang	7.042.856						16.502.856		52.001.432		142,90	
			Indikator Hasil : Terfasilitasinya pemulangan warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota																					
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Indikator Kegiatan : Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial																					
		Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	**Sasaran : Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas dan ODGJ**																					
			Indikator Kegiatan : Persentase Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi.																					
45.		Penyediaan Permakanan	Indikator Keluaran : Jumlah Lansia yang memperoleh bantuan permakanan	425 Lansia	1.037.728.981	425 Lansia	1.036.298.125	425 Lansia	1.040.727.720	425 Lansia	10.980.896	425 Lansia	616.074.738						627.055.634		1.663.353.759		160,29	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan permakanan perorang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota																					
46		Penyediaan Sandang	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	50.000.009	12 Orang	47.997.399	12 Orang	31.432.360	12 Orang	-	12 Orang	1.318.369						1.318.369		49.315.768		98,63	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan permakanan perorang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota																					

47		Penyediaan Alat Bantu	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50.000.064	10 Orang	49.717.654	10 Orang	45.289.766	10 Orang	-	10 Orang	28.727.654						28.727.654		78.445.308		156,89	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
48		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	19.999.993	20 Orang	10.793.083	20 Orang	8.143.170	20 Orang	-	20 Orang	1.793.083						1.793.083		12.586.166		62,93	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																					
49		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	40.031.982	50 Orang	39.811.982	50 Orang	65.999.886	50 Orang	-	50 Orang	2.858.902						2.858.902		42.670.884		106,59	
			Indikator Hasil : Terlaksananya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																					
50		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat	Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	1.306.150.982	500 Orang	1.302.653.550	500 Orang	1.144.886.259	500 Orang	5.063.385	500 Orang	865.586.914						870.650.299		2.173.303.849		166,39	
			Indikator Hasil : Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																					

51		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	14.999.053	20 Orang	13.899.053	20 Orang	3.499.960	20 Orang	-	20 Orang	737.040					737.040		14.636.093		97,58	
			Indikator Hasil : Terpenuhi Kebutuhan orang yang membuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																			
52		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	89.989.786	15 Orang	85.101.116	15 Orang	65.999.489	15 Orang	-	15 Orang	1.009.800					1.009.800		86.110.916		95,69	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																			
53		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20.000.094	20 Orang	14.713.184	20 Orang	4.252.870	20 Orang	-	20 Orang	2.553.184					2.553.184		17.266.368		86,33	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
54		Pemberian Layanan Kedaruratan	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	59.999.854	10 Orang	56.989.554	10 Orang	3.290.000	10 Orang	-	10 Orang	2.299.854					2.299.854		59.289.408		98,82	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota																			

55		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	9.999.943	10 Orang	3.143.033	10 Orang	4.544.000	10 Orang	-	10 Orang	1.643.033						1.643.033		4.786.066		47,86	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																					
56		Pemberian Layanan Rujukan	Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang	219.499.924	370 Orang	216.383.924	370 Orang	194.464.801	370 Orang	17.320.000	370 Orang	84.921.700						102.241.700		318.625.624		145,16	
			Indikator Hasil : Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Indikator Kegiatan : Cakupan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya																					
		Pemeliharaan Anak-anak terlantar	**Sasaran : Anak Terlantar dan Penduduk Miskin**																					
			Indikator Kegiatan : Jumlah Panti Asuhan yang di Bina dalam Menyediakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial																					
60		Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Indikator Keluaran : Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6.999.661	6 Orang	5.449.661	6 Orang	**1.999.994**	6 Orang	450.000	6 Orang	2.249.661						2.699.661		8.149.322		116,42	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya Penjangkauan anak-anak terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota																					
61		Rujukan Anak-anak Terlantar	Indikator Keluaran : Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	4.999.700	15 Orang	699.700	15 Orang	**1.999.332**	15 Orang	-	15 Orang	699.700						699.700		1.399.400		27,99	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota																					

62		Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Indikator Keluaran : Jumlah panti asuhan yang dibina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial	9 Panti Asuhan	**165.094.346**	9 Panti Asuhan	**159.169.771**	9 Panti Asuhan	**231.999.643**	9 Panti Asuhan	-	9 Panti Asuhan	125.648.460					125.648.460		284.818.231		172,52	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah panti asuhan yang dibina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial																					
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Sasaran : Anak Terlantar dan Penduduk Miskin**																					
			Indikator Kegiatan : Tersedianya Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang Disusun																					
49.		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran :Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dok	791.526.048	1 Dok	668.063.154	1 Dok	204.118.343	1 Dok	8.753.385	1 Dok	154.948.362					163.701.747		831.764.901		105,08	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun																					
50.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran :Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dok	30.572.910	1 Dok	30.272.511	1 Dok	20.208.291	1 Dok	10.400.000	1 Dok	12.845.081					23.245.081		53.517.592		175,05	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun																					
51.		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan	5 Jenis Bantuan	336.710.060	5 Jenis Bantuan	333.189.105	5 Jenis Bantuan	206.167.620	5 Jenis Bantuan	5.530.896	5 Jenis Bantuan	49.283.058					54.813.954		388.003.059		115,23	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan																					
52		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	6 Kube	25.521.550	6 Kube	25.336.550	6 Kube	31.214.560	6 Kube	-	6 Kube	7.991.550					7.991.550		33.328.100		130,59	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan																					

		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Indikator Kegiatan : Persentase korban bencana alam/non alam tertangani																					
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Sasaran : Korban Bencana Alam dan Sosial**																					
			Indikator Kegiatan : Persentase Korban Bencana yang mendapat Bantuan.																					
53.		Penyediaan Makanan	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Org	110.930.930	300 Org	110.477.696	300 Org	104.115.520	300 Org	5.530.896	300 Org	-					5.530.896		116.008.592		104,58	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota																					
54.		Penyediaan Sandang	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Org	30.003.866	300 Org	29.913.866	300 Org	22.365.719	300 Org	-	300 Org	-					-		29.913.866		99,70	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota																					
55.		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Indikator Keluaran : Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit	62.805.215	15 Unit	14.283.905	15 Unit	6.065.041	15 Unit		15 Unit						-		14.283.905		22,74	
			Indikator Hasil : Tersedianya tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota																					
56		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Org	24.376.905	300 Org	10.627.895	300 Org	4.304.637	300 Org		300 Org						-		10.627.895		43,60	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
57		Pelayanan Dukungan Psikososial	Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Org	34.862.300	300 Org	12.223.600	300 Org	4.955.040	300 Org		300 Org						-		12.223.600		35,06	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota																					

		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Indikator Kegiatan : Peningkatan Pelestarian Taman Makam Pahlawan (TMP)/Monumen san Nilai Kepahlawanan																					
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Sasaran : 3 TMP'**																					
			Indikator Kegiatan : Persentase Taman Makam Pahlawan yang mendapatkan Pemeliharaan																					
57.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Jumlah Taman Makam Pahlawanan yang dipelihara	2 TMP	130.454.926	2 TMP	130.313.489	2 TMP	62.194.572	2 TMP	4.800.000	2 TMP	12.000.000					16.800.000		147.113.489		112,77	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya Taman Makam Pahlawan yang dipelihara																					
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indikator keluaran : Tersedianya Data IPG dan IDG																					
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator keluaran : Tersedianya Data IPG dan IDG																					
			Sasaran : Perempuan dan Lembaga																					
58.		Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Indikator Keluaran : Jumlah pertemuan penyusunan indikator APE	3 Pertemuan	96.186.108	3 Perangkat Daerah	94.923.668	3 Perangkat Daerah	49.839.880	3 Perangkat Daerah	9.070.887	3 Perangkat Daerah	-					9.070.887		103.994.555		108,12	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah pertemuan penyusunan indikator APE																					

		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator keluaran : Tersedianya Data IPG dan IDG																				
			Sasaran : Perempuan dan Lembaga																				
59.		Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indikator Keluaran : Jumlah Peserta yang dibina	20 Org	55.192.988	20 Org	55.067.218	20 Org	25.020.561	20 Org	8.970.561	20 Org	-					8.970.561		64.037.779		116,03	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Peserta yang dibina																				
60.		Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi	Indikator Keluaran : Jumlah kaum perempuan yang mengikuti pendidikan dasar hukum dan politik	70 Org	172.935.776	70 Org	171.471.284	70 Org	134.999.358	70 Org	7.958.937	70 Org	-					7.958.937		179.430.221		103,76	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah kaum perempuan yang mengikuti pendidikan dasar hukum dan politik																				
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Kegiatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan																					
61		Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Lembaga	2.339.314.215	31 Lembaga	2.339.274.215	31 Lembaga	1.111.974.813	31 Lembaga	-	31 Lembaga	111					111		2.339.274.326		100,00	
			Indikator Hasil : Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
62		Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	110 Orang	61.060.649	110 Orang	61.060.649	110 Orang	36.307.913	110 Orang	-	110 Orang	-					-		61.060.649		100,00	
			Indikator Hasil : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																				

63		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Hari Kartini dan Hari Ibu	2 Dok	114.863.197	2 Dok	114.841.219	2 Dok	116.333.896	2 Dok	-	2 Dok	-						-		114.841.219		99,98	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Kegiatan Hari Kartini dan Hari Ibu																				
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan																				
		Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	**Indikator Keluaran : Jumlah Sosialisasi / Peretemuan Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapat Kekerasan dalam Rumah Tangga**																				
64.		Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah sosialisasi / pertemuan perlindungan terhadap perempuan yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga	3 Perangkat Dearah	147.433.400	3 Perangkat Dearah	142.160.880	3 Perangkat Dearah	130.716.484	3 Perangkat Dearah	5.998.407	3 Perangkat Dearah	-						5.998.407		148.159.287		100,49	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah sosialisasi / pertemuan perlindungan terhadap perempuan yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga																				
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	**Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disusun**																				
65.		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	25 Orang	81.125.762	25 Orang	74.246.282	25 Orang	96.121.261	25 Orang	16.118.400	25 Orang	-						16.118.400		90.364.682		111,39	
			Indikator Hasil : Tersediannya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota																				

		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	**Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disusun**																				
66		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	68.933.309	1 Dok	68.419.959	1 Dok	17.376.598	1 Dok	15.374.999	1 Dok	-					15.374.999		83.794.958		121,56	
			Indikator Hasil : Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota																				
		PROGRAM PENINGKATAN KWALITAS KELUARGA	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun						**196.759.582**														
		Peningkatan Kualitas Keluarga dan Mewujudkan Kesertaan Gender (KG) dan Hak Anak Tingat Daerah/ Kabupaten Kota	**Persentase (%) Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun**						96.759.851														
67		Advokasi kebijakan dan pendampingan anak mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan Kabupaten / Kota	Indikator Keluaran : Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	149.986.371	100 Orang	149.969.262	100 Orang	96.759.851	100 Orang	-	100 Orang	-					-		149.969.262		99,99	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																				
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya melingkupi Kabupaten/Kota						99.999.731															
67		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	149.986.371	100 Orang	149.969.262	100 Orang	99.999.731	100 Orang	-	100 Orang	8.565.000					8.565.000		158.534.262		105,70	
			Indikator Hasil : Terpenuhinya sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																				

		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun																					
		Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	**Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun**																					
67.		Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun	2 Dok	72.272.154	2 Dok	71.465.636	2 Dok	49.929.304	2 Dok	5.063.385	2 Dok	-					5.063.385		76.529.021		105,89	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun																					
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA**																					
		Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	**Indikator Keluaran :Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun**																					
68.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun	1 Dok	50.513.229	1 Dok	49.797.745	1 Dok	95.925.030	1 Dok	9.220.896	1 Dok	-					9.220.896		59.018.641		116,84	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun																					

		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	**Indikator Keluaran : Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak**																					
70		Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Jumlah peserta forum anak daerah tingkat Kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan yang dibina	360 Org	173.784.002	360 Org	170.390.557	360 Org	100.145.141	360 Org	-	360 Org	-						-		170.390.557		98,05	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah peserta forum anak daerah tingkat Kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan yang dibina																					
80		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dok	90.033.131	2 Dok	76.398.027	2 Dok	-	2 Dok		2 Dok							-		76.398.027		84,86	
			Indikator Hasil : Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota																					
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase Penanganan Kasus Anak yang tertangani**						**128.558.064**		**2.310.000**													
		Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	**Indikator Keluaran :Jumlah desa yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak**						**16.634.952**															
70		Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	0	-	0	-	0	16.634.952	30 Dok	-	4 PD	-						-		-		#DIV/0!	
			Indikator Hasil : Tersusun nya kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota																					

		Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	**Indikator Keluaran :Jumlah Kader PATBM yang dibentuk**						**111.923.112**		2.310.000													
72		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	0	-	0	-	0	111.923.112	50 orang	2.310.000	50 orang	-					2.310.000		2.310.000		#DIV/0!	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan																					
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Indikator Keluaran : Laporan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**																					
			Sasaran : OPD Lintas Sektor Terkait																					
		Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengendalian Penduduk yang disusun**						**34.045.228**		-													
77.		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen GDPK yang disusun	1 Dok	44.839.140	1 Dok	304.140	1 Dok	12.483.948	1 Dok	-	1 Dok	-					-		304.140		0,68	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen GDPK yang disusun																					
77.		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana(Bangga Kencana)	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	1 Dok	44.839.140	1 Dok	304.140	1 Dok	8.250.000	1 Dok	-	1 Dok						-		304.140		0,68	
			Indikator Hasil : Persentase Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)																					

78.		Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	22 Sekolah	10.310.320	22 Sekolah	-	22 Sekolah	13.311.280	22 Sekolah	-	22 Sekolah	-						-		-		0,00	
			Indikator Hasil :Persentase Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																					
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Penduduk yang disusun**						**290.579.914**		**-**													
79.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Indikator Keluaran : Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	1 Lap	2.025.000	1 Lap	-	1 Lap	65.989.750	1 Lap		1 Lap	-						-		-		0,00	
			Indikator Hasil : Tersedianya laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga																					
		Pencatatan danpengumpulan data keluarga	Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	2 Dok	64.199.421	2 Dok	23.858.421	2 Dok	101.400.000	2 Dok		2 Dok							-		23.858.421		37,16	
			Indikator Hasil : Tersedianya Data dan Informasi Keluarga																					
		Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dok	101.400.000	2 Dok	-	2 Dok	117.994.774	2 Dok	-	2 Dok							-		-		0,00	
			Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																					

80.		Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Lap	114.602.240	1 Lap	45.044.960	1 Lap	3.365.000	1 Lap	-	1 Lap	-						-		45.044.960		39,31	
			Indikator Hasil : Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan																					
81.		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Indikator Keluaran :Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	33 Lap	366.389	33 Lap	366.389	33 Lap	1.830.390	33 Lap	-	33 Lap	-						-		366.389		100,00	
			Indikator Hasil : Tersedianya Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana																					
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Indikator Keluaran : Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif**						**3.510.885.417**															
			Sasaran : Pasangan Usia Subur, Lintas Sektoral, Mitra kerja																					
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	**Indikator Keluaran : Jumlah Sosialisasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB.**						**2.121.489.408**		-													
82.		Pengendalian Program KKBPK	Indikator keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP	1 Lap	120.000.000	1 Lap	114.905.000	1 Lap	677.499.680	1 Lap	-	1 Lap	-						-		114.905.000		95,75	
			Indikator Hasil : Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP																					
83		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Indikator keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Lap	149.999.983	1 Lap	148.988.220	1 Lap	818.998.758	1 Lap	-	1 Lap	-						-		148.988.220		99,33	
			Indikator Hasil : Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)																					

84		Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok)	Indikator keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	32 Laporan	195.000.000	32 Laporan	40.580.000	32 Laporan	225.000.000	1 Laporan	-	1 Laporan	-						-		40.580.000		20,81	
			Indikator Hasil : Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																					
85		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media luar Ruang	Indikator keluaran :Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dok	12.767.832	1 Dok	465.325.500	1 Dok	149.990.970	1 Dok	-	1 Dok	-						-		465.325.500		3644,51	
			Indikator Hasil : Tersedianya Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)																				
86		Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Indikator keluaran :Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	6.848.028	4 Organisasi	80.000.000	4 Organisasi	250.000.000	4 Organisasi	-	4 Organisasi	-						-		80.000.000		1168,22	
			Indikator Hasil : Persentase Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																				

		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB	**Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang mendapat sarana Pendukung Operasional**						**507.000.000**														
89		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Indikator keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	15 Org	**612.000.000**	15 Org	464.800.000	15 Org	507.000.000	15 Org	-	15 Org	-						-		464.800.000		75,95	
			Indikator Hasil : Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																-		-		#DIV/0!	
		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	**Jumlah Faskes yang mendapat Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi**						**463.921.429**		**-**												
90		Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Indikator keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Lap	21.600.000	1 Lap	21.600.000	1 Lap	31.500.000	1 Lap	-	1 Lap	-						-		21.600.000		100,00	
			Indikator Hasil : Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke																				
91		Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)	Indikator keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12.709 Orang	314.297.667	12.709 Orang	313.429.470	12.709 Orang	365.671.429	12.709 Orang	-	12.709 Orang	-						-		313.429.470		99,72	
			Indikator Hasil : Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																				
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Indikator keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Lap	36.300.000	1 Lap	36.300.000	1 Lap	66.750.000	1 Lap	-	1 Lap	-						-		36.300.000		100,00	
			Indikator Hasil : Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																				

		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	**Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**						**418.474.580**		**4.641.117**													
93		Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Indikator keluaran : Jumlah Laporan kegiatan penguatan peran serta Ormas dan Mitra Kerja Dalam pelaksanaan Pelayanan KB	3 Organisasi	35.907.973	3 Organisasi	35.389.429	3 Organisasi	34.724.580	3 Organisasi	4.641.117	3 Organisasi	-					4.641.117		40.030.546		111,48	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Laporan kegiatan penguatan peran serta Ormas dan Mitra Kerja Dalam pelaksanaan Pelayanan KB																				
94		Integrasi pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Indikator keluaran : Jumlah Laporan integritas	1 Dok	1.128.972.500	1 Dok	-	1 Dok	11.750.000	1 Dok	-	1 Dok	-					-		-		0,00	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Laporan integritas																				
95.		Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Indikator keluaran : Jumlah cakupan pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	1 Dok	496.000.000	1 Dok	98.915.999	1 Dok	372.000.000	1 Dok	-	1 Dok	-					-		98.915.999		19,94	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah cakupan pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB																				

		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Indikator Keluaran : Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)**																				
			Sasaran : Kader Bina Ketahanan Keluarga																				
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	**Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapat pembinaan**						**378.058.318**														
97.		Pengolahan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Indikator keluaran : Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3 Lap	14.113.953	3 Lap	12.663.953	3 Lap	28.800.000	3 Lap	-	3 Lap	-					-		12.663.953		89,73	
			Indikator Hasil : Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																				
98.		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Indikator keluaran : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1 Lap	360.000.000	1 Lap	232.840.000	1 Lap	35.144.687	1 Lap	-	1 Lap	-					-		232.840.000		64,68	
			Indikator Hasil : TerpenuhinyaPromosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																				
99.		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Indikator keluaran :Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	20 Unit	946.310.000	20 Unit	1.267.280.000	20 Unit	299.999.700	20 Unit	-	20 Unit	-					-		1.267.280.000		133,92	
			Indikator Hasil :Persentase Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																				

100		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Indikator keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	12 Kmlpk	62.243.698	12 Kmlpk	-	12 Kmlpk	14.113.931	12 Kmlpk	-	12 Kmlpk&110 Org	-					-		-		0,00	
			Indikator Hasil : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																					
		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Indikator Keluaran : Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'**						**2.467.561.142**		**-**												
101		Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indikator keluaran : Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan	1 Lap	14.649.202	1 Lap	39.527.302	1 Lap	4.261.142	1 Lap	-	1 Lap	-					-		39.527.302		269,83	
			Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'																				
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stanting Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil Paska Salin/Kelahiran, Baduta, Balita)	Indikator keluaran : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1173 Lap	-	1173 Lap	-	1173 Lap	2.463.300.000,00	1173 Lap	-	1173 Lap	-											
			Indikator Hasil : Persentase Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan																				
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														
									Predikat Kinerja														

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :	a. Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk berubah dari keadaan sekarang menuju kearah yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
	b. Motivasi tinggi yang dimiliki oleh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung demi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sanggau.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :	a. Terbatasnya tenaga professional yang tersedia sehingga pelayanan yang diberikan belum optimal
	b. Fasilitasi sarana dan prasarana dibidang pelayanan belum memadai, hal ini berpengaruh terhadap proses pelayanan dan rehabilitasi.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes). Bidang Sosial merupakan bagian dari Enam urusan wajib pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan, Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota. Dalam Peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 5 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 tahun 2022 khusus untuk bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pengampuh SPM, sudah mengakomodir seluruh sub kegiatan yang ada pada Permendagri 84 Tahun 2022, hal ini bertujuan agar pencapaian SPM pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

dapat melakukan pelayanan yang maksimal sesuai dengan target capaian kinerja yang ada pada SPM Bidang sosial, khususnya bidang Rehabilitasi Sosial. Dimana capaian pelaporan SPM rutin dilakukan secara Triwulan kepada Bangda Kemendari.

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel 2.2 Terlampir:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINSOSP3AKB
Kabupaten Sanggau

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PMKS yang tertangani	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial;		96,9	97	97,45	97,75	69,06	69,06	97,45	97,75	
		Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	97,45	97,75	
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial;		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	97,45	97,75	
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan pengemis luar panti sosial;		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	97,45	97,75	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap darurat Bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	97,45	97,75	
2	Persentase PPKS yang mandiri	%		25,00	25,00	26,50	26,50	25,39	25,39	25,60	25,60	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%		61,54	61,42	61,54	61,65	10,22	10,22	61,54	61,65	
4	Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	%		Madya	Madya	Madya	Madya	Pratama	Madya	Madya	Madya	
5	Total Fertility Rate	Point		2.22	2.23	2.22	2.21	2,18	2,18	2.22	2.21	
6	Nilai AKIP Dinsosp3akb	%		60,00	65,00	68,00	69,00	69,50	69,50	69,50	69,50	

1.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Seperti diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Sanggau 2014-2019,dimana diharapkan semua kepentingan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, politik dan ekonomi agar dapat diakomodir dengan fokus untuk mewujudkan masayarakat Kabupaten Sanggau yang Maju dan Terdepan.

Untuk jangka waktu lima tahun kedepan seiring dengan perubahan yang terjadi, beberapa isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau kedepan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. **Sosial**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan sosial adalah:

a. Belum optimalnya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
b. Belum terbangunnya sistem perlindungan dan jaminan sosial.

2. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:

a. Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;
b. Pembangunan responsif gender belum maksimal;
c. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak belum memadai; dan

d. Belum optimalnya sarana, prasarana dan penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
e. Belum maksimalnya Advokasi, KIE perempuan dan anak

3. **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

a. Sarana dan prasarana pendukung program KB belum memadai;
b. Belum optimalnya pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi); dan
c. Masih rendahnya akseptor dan partisipasi keikutsertaan pria dalam program KB.
d. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
e. Belum Optimalnya system pencatatan dan pelaporan pengendalian penduduk.

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemenrintah Daerah Kabupaten Sanggau pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 terdapat 15 (Lima Belas) Program (Sembilan Belas) Program dan 64 (Enam Puluh Empat) Kegiatan. Setelah melaksanakan Asisten terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau serta menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pada Tahun anggaran 2023 terdapat perubahan jumlah beserta nama program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menjadi 18 (Delapan Belas) Program dan 59 (Lima Puluh Sembilan) Kegiatan. Pada tahun 2021 terdapat perubahan kodesifikasi dan Nomenklatur dalam penyusunan Rencana Kerja yang tertuang dalam Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana pada bulan mei tahun 2020 telah dilakukan maping antara permendagri 13 dan permendagri 90 yang dtuangan kan dalam BA Maping antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, setelah dilakukan maping tersebut ternyata pada bulan September 2020 terjadi pemutakhiran terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, hasil pemutakhiran tersebut dtuangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021. Sesuai Pemutakhiran Permendagri nomor 90 Tahun 2019 untuk Dinas Sosial, Permberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau terdapat 15 (Lima Belas) Program, 36 (Tiga Puluh Enam Kegiatan) serta 109 (Seratus Sembilan) Sub Kegiatan. Pada Rancangan Renja Perubahan Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mengajukan Penambahan anggaran sebesar Rp. 849.731.920,- anggaran

ini di ajukan guna mengakomodir kekurangan anggaran pada anggaran murni tahun 2024. Hal ini dipandang perlu agar kegiatan yang ada di tahun 2024 dapat berjalan dengan maksimal menggunakan anggaran yang ada. Pada Perubahan anggaran tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 566.043.601,- dimana anggaran tersebut di alokasikan untuk :

- Kekurangan DBH CHT Rp. 148.231.023,-
- Penambahan DAU Rp. 300.000.000,-
- Tambahan TPP Rp. 117.812.578,-

Daftar table Review terhadap Rancangan Awal RKPD Terlampir :

Lampiran I
Nomor : 050/1645/I-Bappeda
Tanggal : Sanggau 12 Juli 2023

Review terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2024

Kode					Urusan /Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024										Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah (sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah (sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1					URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												**20.084.234.765**	**20.650.786.845**		
1	06				URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL												**11.113.096.861**	**11.619.686.155**		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA												**5.860.831.832**	**6.194.190.686**		
1	06	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												**48.844.731**	**51.352.587**		
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Sebanyak 3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dok	2 Dokumen	100%	100%	6.868.201	6.868.201	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Sebanyak 1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dok	1 Dokumen	100%	100%	24.218.960	24.218.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun Sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dok	1 Dokumen	100%	100%	2.861.580	2.861.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang disusun Sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dok	1 Dokumen	100%	100%	2.947.050	2.947.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun Sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dok	1 Dokumen	100%	100%	2.167.830	3.568.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan SPIP yang disusun Sebanyak 2 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dok	2 Laporan	100%	100%	3.530.100	4.637.136	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sebanyak 4 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dok	4 Laporan	100%	100%	6.251.010	6.251.010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi dan Keuangan Perangkat**												**4.836.928.150**	**4.967.740.604**		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K/Non PNS) yang disediakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Orang	Orang/Bulan	100%	100%	3.056.232.548	3.056.232.548	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.02	02	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN		Jumlah Laporan Pelaksana Tugas ASN yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	1.531.563.514	1.649.376.092	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	179.359.161	179.359.161	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD		Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	50.199.720	63.199.596	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Laporan	100%	100%	2.975.555	2.975.555	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	9.789.401	9.789.401	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Laporan	100%	100%	5.081.269	5.081.269	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Keuangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	1.726.982	1.726.982	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**													**29.190.599**	**34.603.736**		
1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	6.012.537	11.425.674	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	9.019.112	9.019.112	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Laporan	100%	100%	14.158.950	14.158.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**												**22.695.435**	**41.243.022**		
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	5.133.084	5.133.084	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.05	04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	6.615.770	13.141.541	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	6.849.979	13.114.189	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Terpenuhinya orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	35 Orang	35 Orang	100%	100%	4.096.602	9.854.208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	**06**	**01**	**2.06**		**ADMNISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**													**250.967.445**	**343.210.445**		
1	06	01	2.06	01	Penyedian Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Jenis	Paket	100%	100%	9.971.130	9.971.130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Jenis	Paket	100%	100%	83.840.520	83.840.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Jenis	Paket	100%	100%	30.902.400	30.902.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Jenis	Paket	100%	100%	28.518.786	28.518.786	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan		Persentase Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	9.534.000	9.534.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	07	Penyediaan bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tersedianya Bahan/Material	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Jenis	Paket	100%	100%	24.115.000	25.106.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan tamu	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	3.600.000	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	OH	Laporan	100%	100%	46.425.000	136.777.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	8.430.209	8.430.209	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	5.630.400	5.630.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**												**292.363.140**	**304.197.960**		
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	1 Unit	1 Unit	100%	100%	163.800.000	163.800.000		
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Paket	Unit	100%	100%	128.563.140	128.563.140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	2 Unit	2 Unit	100%	100%	-	11.834.820		

1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													**247.642.332**	**247.642.332**		
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Jenis	Laporan	100%	100%	2.472.000	2.472.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Jenis	Laporan	100%	100%	119.783.000	119.783.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.08	04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Jenis	Laporan	100%	100%	125.387.332	125.387.332	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah**												**132.200.000**	**204.200.000**		
1	06	01	2.09	02	Penyedian Jasa Pemeliharan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Unit	Unit	100%	100%	123.000.000	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Unit	Unit	100%	100%	9.200.000	29.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

					URUSAN SOSIAL												**5.252.265.029**	**5.425.495.469**		
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBEREDAYAAN SOSIAL**	**Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan**											**94.671.070**	**98.761.070**		
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota**												**94.671.070**	**98.761.070**		
1	06	02	2.03	02	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota		Terpenuhinya pembinaan terhadap TKSK	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	54.071.190	54.161.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota		Terpenuhinya Lembaga Sosial yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Lembaga	Lembaga	100%	100%	40.599.880	44.599.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran yang difasilitasi**											**18.039.078**	**42.351.078**		
1	**06**	**03**	**2.01**		**Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal**												**18.039.078**	**42.351.078**		
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal		Jumlah Dokumen pemulangan warga negara migran yang tertangani	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pemulangan warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Dokumen	Orang	100%	100%	18.039.078	42.351.078	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**													**2.612.530.281**	**2.586.737.911**		
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial**													**2.612.530.281**	**2.586.737.911**		
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan		Jumlah Lansia yang memperoleh bantuan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan permakanan perorang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Lansia	Orang	100%	100%	1.040.727.720	1.040.727.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Laimya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	31.432.360	31.432.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	45.289.766	45.289.766	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	8.143.170	8.143.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	65.999.886	65.999.886	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	06	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat		Jumlah penyandang disabilitas, lansia terlantar dan ODGJ	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Dokumen	Orang	100%	100%	1.144.886.259	1.144.886.259	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhi Kebutuhan orang yang membuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	3.499.960	3.499.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	65.999.489	65.999.489	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	4.252.870	4.252.870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	3.290.000	3.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	4.544.000	4.544.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Penyandang Disabilitas/ODGJ yang tertangani	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Dokumen	Orang	100%	100%	194.464.801	168.672.431	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**05**	**2.01**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**												**2.323.024.071**	**2.487.132.511**		
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-anak Terlantar**	**Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan**											**235.998.969**	**252.468.969**		
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-anak Terlantar		Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penjangkauan anak-anak terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	1.999.994	1.999.994	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-anak Terlantar		Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	1.999.332	1.999.332	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar		Jumlah panti asuhan yang dibina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Panti Asuhan	Orang	100%	100%	231.999.643	248.469.643	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**												**2.087.025.102**	**2.234.663.542**		
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Dokumen Data Miskin Kabupaten Sanggau	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	150.000 Orang	150.000 Orang	100%	100%	204.118.343	204.118.343	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Pengelolaan Data Fakir Kabupaten Sanggau	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	49.957 Keluarga	49.957 Keluarga	100%	100%	20.208.291	22.548.291	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Terpenuhinya Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	145.985 Keluarga	145.985 Keluarga	100%	100%	1.417.579.056	1.576.932.056	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	50 Orang	50 Orang	100%	100%	445.119.412	431.064.852	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan**											**141.805.957**	**141.805.957**		
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan**											**141.805.957**	**141.805.957**		
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan		Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam/Sosial yang menerima makanan yang disediakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	104.115.520	104.115.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang		Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam/Sosial yang menerima Sandang yang disediakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	22.365.719	22.365.719	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	6.065.041	6.065.041	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	4.304.637	4.304.637	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kec	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	4.955.040	4.955.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang di pelihara**											**62.194.572**	**68.706.942**		
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**												**62.194.572**	**68.706.942**		
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Pemeliharaan TMP Kab. Sanggau	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 Kec	100%	100%	Makam	Makam	100%	100%	62.194.572	68.706.942	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**												**2.290.007.885**	**2.349.970.671**		
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun**											**1.474.476.421**	**1.516.476.287**		
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penyusunan indikator APE**											**49.839.880**	**49.839.880**		
2	08	02	2.01	03	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Pertemuan Penyusunan Indikator APE	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Pertemuan	Perangkat Daerah	100%	100%	49.839.880	49.839.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota**												**160.019.919**	**160.019.919**		
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		Jumlah Peserta yang di bina	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Orang	Dokumen	100%	100%	25.020.561	25.020.561	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	02	2.02	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi		Jumlah Kaum Perempuan yang mengikuti pendidikan sadar hukum dan politik	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Orang	Organisasi	100%	100%	134.999.358	134.999.358	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota**												**1.264.616.622**	**1.306.616.488**		
2	08	02	2.03	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota		Jumlah Organisasi Perempuan yang Di Bina	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Organisasi Perempuan	Lembaga	100%	100%	1.111.974.813	1.153.974.679	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota		Jumlah pertemuan dan pembinaan dalam rangka kegiatan KSI	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	5 Kali Pembinaan	200 Orang	100%	100%	36.307.913	36.307.913	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Hari Kartini dan Hari Ibu	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	2 kegiatan	Dokumen	100%	100%	116.333.896	116.333.896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani**											**244.214.343**	**259.177.454**		
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota**												**130.716.484**	**130.716.484**		
2	08	03	2.01	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota		Jumlah Dokumen sosialisasi perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan yang disusun	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Perangkat Daerah	100%	100%	130.716.484	130.716.484	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota**												**96.121.261**	**111.084.372**		
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota		Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani	Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	Tersediannya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Kasus	Orang	100%	100%	96.121.261	111.084.372	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota**												**17.376.598**	**17.376.598**		
2	08	03	2.03	04	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disepakati	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	17.376.598	17.376.598	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	04			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**												**196.759.582**	**196.759.582**		
2	**08**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**												**96.759.851**	**96.759.851**		
2	08	05	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100%	100%	96.759.851	96.759.851	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya melingkupi Kabupaten/Kota												**99.999.731**	**99.999.731**		
2	08	05	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Orang	Orang	100%	100%	99.999.731	99.999.731	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik**											**49.929.304**	**57.128.897**		
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun**											**49.929.304**	**57.128.897**		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota		Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	2 Dok	2 Dok	100%	100%	49.929.304	57.128.897	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik**											**196.070.171**	**191.870.387**		
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun**											**95.925.030**	91.725.246		

2	08	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Haka Anak pada organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Haka Anak pada organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan Media dan Dunia Usaha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	95.925.030	91.725.246	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota.												**100.145.141**	**100.145.141**		
2	08	06	2.01	02	Pengembangan Komunkiasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota.		Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	100.145.141	100.145.141	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**												**128.558.064**	**128.558.064**		
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota**												**16.634.952**	**16.634.952**		
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Desa yang mendapat sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Desa	Dokumen	100%	100%	16.634.952	16.634.952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota**												**111.923.112**	**111.923.112**		
2	08	07	2.02	01	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Terpenuhinya AMPK yang mendapatkan layanan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	100%	100%	Kader	Orang	100%	100%	111.923.112	111.923.112	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**													**6.681.130.019**	**6.681.130.019**		
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**												**324.625.142**	**324.625.142**		
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tersusun dengan baik**												**34.045.228**	**34.045.228**		
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen GDPK yang disusun	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	15 Kec	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	12.483.948	12.483.948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	02	2.01	20	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana(Bangga Kencana)		Jumlah dokumen GDPK yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	Tersedianya Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	15 Kec	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	8.250.000	8.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	02	2.01	21	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		jumlah Sekolah yang menjadi sekolah siaga kependudukan	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Tersedianya Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	15 Kec	100%	100%	Sekolah	Dokumen	100%	100%	13.311.280	13.311.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**													**290.579.914**	**290.579.914**		
2	14	02	2.01	09	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	15 Kec	100%	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	65.989.750	65.989.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	02	2.01	12	Pencatatan danpengumpulan data keluarga		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	15 Kec	100%	100%	2 Laporan	2 Dok	100%	100%	101.400.000	101.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	02	2.01	13	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	15 Kec	100%	100%	1 Laporan	2 Dok	100%	100%	117.994.774	117.994.774	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	02	2.01	14	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	15 Kec	100%	100%	Jumlah Dokumen dan Laporan DaLap & Yan KB	1 Lap	100%	100%	3.365.000	3.365.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	02	2.01	18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana		Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Tersedianya Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	15 Kec	100%	100%	Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan	33 Lap	100%	100%	1.830.390	1.830.390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif**										**3.510.885.417**	**3.510.885.417**		
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**		**Jumlah Dokumen Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB**										**2.121.489.408**	**2.121.489.408**		
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Dokumen KKBPK yang disusun	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	15 Kec	100%	100%	Dokumen	Laporan	100%	100%	677.499.680	677.499.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Kec	100%	100%	Media	Dokumen	100%	100%	818.998.758	818.998.758	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Organisasi Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Tersedianya Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	15 Kec	100%	100%	Rapat	Laporan	100%	100%	225.000.000	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media luar Ruang		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersedianya Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	15 Kec	100%	100%	Desa	Laporan	100%	100%	149.990.970	149.990.970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.01	14	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terpenuhinya Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	15 Kec	100%	100%	Dokumen	Laporan	100%	100%	250.000.000	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**												**507.000.000**	**507.000.000**		
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Instituisi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Laporan Evaluasi Program KKBPK	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	15 Kec	100%	100%	Paket	Orang	100%	100%	507.000.000	507.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**												**463.921.429**	**463.921.429**		
2	14	03	2.03	01	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya		Jumlah Faskes, Jejaring dan Jejaringnya yang mendapat distribudi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Kec	100%	100%	Faskes	Laporan	100%	100%	31.500.000	31.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)		Jumlah Kesertaan Penggunaan MKJP	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15 Kec	100%	100%	Akseptor	Orang	100%	100%	365.671.429	365.671.429	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.		Jumlah Faskes yang Mendapat Pembinaan Pelayanan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Kec	100%	100%	Faskes	Laporan	100%	100%	66.750.000	66.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**												**418.474.580**	**418.474.580**		
2	14	03	2.04	01	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB		Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Peran Serta Ormasdan Mitra Kerja Dalam Pelaksanaan Pelayanan KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 Kec	100%	100%	Dokumen	Organisasi	100%	100%	34.724.580	34.724.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Tersedianya Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	15 Kec	100%	100%	Dokumen	Dokumen	100%	100%	11.750.000	11.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DAK	
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB		Jumlah Cakupan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	15 Kec	100%	100%	Dokumen	Kampung	100%	100%	372.000.000	372.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)**											**2.845.619.460**	**2.845.619.460**		
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapatkan Pembinaan**											**378.058.318**	**378.058.318**		
2	14	04	2.01	16	Pengolahan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Tersedianya laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	15 Kec	100%	100%	Kelompok	3 Lap	100%	100%	28.800.000	28.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	04	2.01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15 Kec	100%	100%	20 Unit	1 Lap	100%	100%	35.144.687	35.144.687	DAK	
2	14	04	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Tersedianya Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	15 Kec	100%	100%	Desa	20 Unit	100%	100%	299.999.700	299.999.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	04	2.01	28	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Tersedianya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	15 Kec	100%	100%	7 Kelompok	12 Kmpk	100%	100%	14.113.931	14.113.931	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'**										**2.467.561.142**	**2.467.561.142**		
2	14	04	2.02	02	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitrakerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Opersional Pembinaan Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIR R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)		Jumlah Kader yang mendapatkan advokasi dari mitra kerja / organisasi kemasyarakatan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitrakerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Opersional Pembinaan Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIR R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Terlaksananya Pendayagunaan Mitrakerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Opersional Pembinaan Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIR R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	15 Kec	100%	100%	orang	Laporan	100%	100%	4.261.142	4.261.142	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	04	2.02	06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stanting Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil Paska Salin/Kelahiran, Baduta, Balita)		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Terpenuhinya Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	15 Kec	100%	100%	orang	1173 Lap	100%	100%	2.463.300.000	2.463.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

5.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masuarakat

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Dari 15 (Lima belas) program dan 35 (Tiga Puluh Lima) Kegiatan dan 116 (Seratus enam belas) Sub kegiatan ada satu kegiatan lama yang tidak dimasukkan dalam Ranwal 2024, yaitu Kegiatan Penataan Organisasi yang merupakan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisai.

Dari Hasil Musyawarah Pembangunan Daerah tingkat kecamatan untuk tahun 2024 terdapat beberapa usulan dari masyarakat yaitu usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) RTLH yang diusulkan oleh beberapa kecamatan dan yang telah berhasil di Verifikasi oleh Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin yang diusulkan untuk tahun 2024. Selain usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diusulkan oleh Masyarakat ada juga beberapa program kegiatan lain yang diusulkan terkait sosialisasi mengenai peningkatan Kapasitas Perempuan terhadap Pembangunan, Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mulai dari pelaporan hingga rujukan ODGJ menggunakan BPJS untuk dapat di antarkan ke Rumah Sakit Jiwa Singkawang untuk di lakukan Rehabilitasi.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Sanggau

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab.Sanggau	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	150.000 Orang	

			Kota yang di Data		
2.	Pemberian Layanan Rujukan	Kab.Sanggau	Jumlah Orang mendapatkan layanan Rujukan kewenangan Kabupaten Sanggau	370 Orang	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana Strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        a. Penyusunan Dokume Perencanaan Perangkat Daerah
        b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
        d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
        e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Derah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/verifikasi keuangan SKPD
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD
f. Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan
g. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
h. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a. Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang milik daerah SKPD
b. Pengamanan Barang milik daerah
c. Penatausahaan barang milik Daerah

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
b. Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian
c. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
d. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
b. Penyediaan peralatan dan perlengkapankan kantor
c. Penyediaan bahan logistic kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
f. Penyediaan bahan/materian
g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
h. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
i. Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Pengadaan kendaraan Dinasoperasional dan lapangan

b. Pengadaan Mebel

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan jasa surat menyurat
   b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
   b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
   c. Pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Pemberdayaan Sosial
   1) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota
      a. Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota
      b. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
   1) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke desa/keluarahan asal.
      a. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
4. Program Rehabilitasi Sosial
   1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial
      a. Penyediaan permakanan
      b. Penyediaan sandang
      c. Penyediaan alat bantu
      d. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
      e. Pemberianbimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
      f. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat.

g. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak.
h. Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar.
i. Pemberian layanan data dan pengaduan
j. Pemberian layanan kedaruratan
k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
l. Pemberian layanan rujukan.

2) Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial.
a. Pemberian layanan data dan pengaduan
b. Penyediaan alat bantu
c. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1) Pemeliharaan anak-anak terlantar
a. Penjangkauan anak-anak terlantar
b. Rujukan anak-anak terlantar
c. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar
2) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota
a. Pendataan fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota
b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
c. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
d. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.

6. Program Penangan Bencana
1) Perlindungan sosial korban bencana alam sosial Kabupaten/Kota
a. Penyediaan Makanan
b. Penyediaan sandang
c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
e. Pelayanan dukungan psikososial

7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
a. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota.

8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1) Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
    a. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelakasanaan PUG termasuk PPRG
2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota
    a. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
    b. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.
3) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota
    a. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota
    b. Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota.
    c. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota.

9. Program Perlindungan Perempuan
    1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
        a. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota.
    2) Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota.
        a. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.
    3) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota
        a. Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten/Kota.
10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
    1) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan haka nak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

a. Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota.

11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
    1) Pengumpulan pengolahan Analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.
        a. Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota.
12. Program Pemenuhan Hak Anak
    1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
        a. Koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan pemenuhan haka nak kewenangan kabupaten/kota.
    2) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota.
        a. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota.
        b. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.
        c. Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.
13. Program Perlindungan Khusus Anak
    1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota.
        a. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota.
        b. Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota.
    2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.
        a. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.
        b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota.

c. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota.
d. Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlidnungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota.

14. Program Pengendalian Penduduk
    1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
        a. Penyerasian kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
        b. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.
        c. Penguatan kerja sama pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur Pendidikan formal.
    2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk capaian daerah Kabupaten/Kota.
        a. Membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK disektor lain.
        b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan system informasi keluarga
        c. Pencatatan dan pengumpulan data keluarga.
        d. Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB.
        e. Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK

15. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
    1) Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
        a. Advokasi program KKBPK kepada Stakeholders dan mitra kerja
        b. Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang
        c. Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini lokakarya (Minilok).
        d. Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK
        e. Pengendalian program KKBPK

2) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB /petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
   a. Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)
3) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota
   a. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
   b. Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
   c. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
   d. Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kebupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
   a. Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
   b. Integrasi pembanugnan lintas sector di Kampung KB
   c. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB

16. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
1) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
   a. Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R), bina keluarga lansia (BKL), Unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
   b. Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS).
   c. Penyediaan biaya operasional bagi pengelolaan dan pelaksana kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)

d. Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /PPKS).
e. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/PPKS)

2) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga.\
   a. Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS).

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja								Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Perubahan	Bertambah/Berkurang (+/-)
											Capaian Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan				
													Tolak Ukur		Target						
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolak Ukur	Target			
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13
																			20.084.234.765	**20.650.786.845**	**566.552.080**
					1	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL**													**11.113.096.861**	**11.619.686.155**	**348.582.316**
	1	06				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinsosp3akab Kab. Sanggau								**5.860.831.832**	**6.194.190.686**	**175.351.876**
	1	**06**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun								**48.844.731**	**51.352.587**	**2.507.856**
	1	**06**	**01**	**2.01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	3 Dok	3 Dok	Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.868.201	6.868.201	-
	1	**06**	**01**	**2.01**	**02**	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD							Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Disusun Sebanyak 1	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Disusun Sebanyak 1	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Disusun Sebanyak 1 Dokumen	100 %	24.218.960	24.218.960	-
	1	**06**	**01**	**2.01**	**03**	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD							Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang dokumen disusun Sebanyak 1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang dokumen disusun Sebanyak 1 dokumen	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun	100 %	2.861.580	2.861.580	-
	1	**06**	**01**	**2.01**	**04**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							Jumlah DPA-SKPD yang disusun Sebanyak 1 Dokumen	Jumlah DPA-SKPD yang disusun Sebanyak 1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah DPA-SKPD yang disusun Sebanyak 1 Dokumen	100 %	2.947.050	2.947.050	-
	1	**06**	**01**	**2.01**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun Sebanyak 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun Sebanyak 1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun	100 %	2.167.830	3.568.650	1.400.820
	1	**06**	**01**	**2.01**	**06**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan SPIP yang disusun Sebanyak 2 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan SPIP yang disusun Sebanyak 2 Dokumen	2 Dok	2 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan SPIP yang disusun Sebanyak 2 Dokumen	100 %	3.530.100	4.637.136	1.107.036
	1	**06**	**01**	**2.01**	**07**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sebanyak 4 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sebanyak 4 Dokumen	4 Dok	4 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sebanyak 4 Dokumen	100 %	6.251.010	6.251.010	-

	1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah**													**4.836.928.150**	**4.967.740.604**	**130.812.454**
	1	**06**	**01**	**2.02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K/Non PNS) yang disediakan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K/Non PNS) yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K/Non PNS) yang disediakan	100 %	3.056.232.548	3.056.232.548	-
	1	**06**	**01**	**2.02**	**02**	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN							Jumlah Laporan Pelaksana Tugas ASN yang disusun	Jumlah Laporan Pelaksana Tugas ASN yang disusun	12 Bulan	12 Bulan	Persentase Laporan Jumlah Laporan Pelaksana Tugas ASN yang disusun	100 %	1.531.563.514	1.649.376.092	117.812.578
	1	**06**	**01**	**2.02**	**03**	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD							Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase Laporan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	100 %	179.359.161	179.359.161	-
	1	**06**	**01**	**2.02**	**04**	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD							Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase Laporan Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	100 %	50.199.720	63.199.596	12.999.876
	1	**06**	**01**	**2.02**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	100 %	2.975.555	2.975.555	-
	1	**06**	**01**	**2.02**	**06**	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	100 %	9.789.401	9.789.401	-
	1	**06**	**01**	**2.02**	**07**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD							Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	100 %	5.081.269	5.081.269	-
	1	**06**	**01**	**2.02**	**08**	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran							Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun	2 Dok	2 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun	100 %	1.726.982	1.726.982	-
	1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai								**29.190.599**	**34.603.736**	**5.413.137**
	1	**06**	**01**	**2.03**	**1**	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang disusun	2 Dok	2 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang disusun	100 %	6.012.537	11.425.674	
	1	**06**	**01**	**2.03**	**02**	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah yang disusun	Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah yang disusun	2 Dok	2 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah yang disusun	100 %	9.019.112	9.019.112	-
	1	**06**	**01**	**2.03**	**06**	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD							Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	3 Dok	3 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	100 %	14.158.950	14.158.950	-

	1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur**								**22.695.435**	**41.243.022**	**18.547.587**
	1	**06**	**01**	**2.05**	**03**	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian							Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun	2 Dok	2 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun	100 %	5.133.084	5.133.084	-
	1	**06**	**01**	**2.05**	**04**	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian							Jumlah Dokumen profil ASN Dinsosp3akab yang disusun	Jumlah Dokumen profil ASN Dinsosp3akab yang disusun	2 Dok	2 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen profil ASN Dinsosp3akab yang disusun	100 %	6.615.770	13.141.541	6.525.771
	1	**06**	**01**	**2.05**	**05**	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai							Jumlah Laporan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang disusun	Jumlah Laporan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Laporan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang disusun	100 %	6.849.979	13.114.189	6.264.210
	1	06	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan							Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	35 Orang	Terpenuhinya orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	4.096.602	9.854.208	5.757.606
	1	**06**	**01**	**2.06**		**ADMNISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**													**250.967.445**	**343.210.445**	**92.243.000**
	1	**06**	**01**	**2.06**	**01**	Penyedian Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor							Jumlah Alat Listrik dan elektronik yang disediakan	Jumlah Alat Listrik dan elektronik yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	Persentase pemenuhan Jumlah Alat Listrik dan elektronik yang disediakan	100 %	9.971.130	9.971.130	-
	1	**06**	**01**	**2.06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	Persentase pemenuhan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	83.840.520	83.840.520	-
	1	**06**	**01**	**2.06**	**04**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100 %	30.902.400	30.902.400	-
	1	**06**	**01**	**2.06**	**05**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	Persentase pemenuhan Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100 %	28.518.786	28.518.786	-
	1	**06**	**01**	**2.06**	**06**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan							Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3352 Eksemplar	3352 Eksemplar	Persentase pemenuhan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 %	9.534.000	9.534.000	-
	1	**06**	**01**	**2.06**	**07**	Penyediaan bahan / Material							Jumlah BBM yang disediakan	Jumlah BBM yang disediakan	4688 Liter	4688 Liter	Persentase pemenuhan Jumlah BBM yang disediakan	100 %	24.115.000	25.106.000	991.000
	1	**06**	**01**	**2.06**	**08**	Fasilitasi Kunjungan Tamu							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12 Lap	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan tamu	100 %	3.600.000	4.500.000	900.000
	1	**06**	**01**	**2.06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Jumlah Perjalanan Dinas ke luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar Daerah	192 OH	192 OH	Persentase pemenuhan Jumlah Perjalanan Dinas ke luar Daerah	100 %	46.425.000	136.777.000	90.352.000
	1	**06**	**01**	**2.06**	**10**	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							Jumlah Arsip Sekretariat dan Bidang yang disusun	Jumlah Arsip Sekretariat dan Bidang yang disusun	5 Dok	5 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Arsip Sekretariat dan Bidang yang disusun	100 %	8.430.209	8.430.209	-
	1	**06**	**01**	**2.06**	**11**	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dok	2 Dok	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	5.630.400	5.630.400	

	1	**06**	**01**	**2.07**		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**					**Jumlah Mebel yang diadakan**								**292.363.140**	**304.197.960**	**11.834.820**
	1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	163.800.000	163.800.000	
	1	**06**	**01**	**2.07**	**05**	Pengadaan Mebel							Jumlah Mebeleur yang diadakan	Jumlah Mebeleur yang diadakan	9 Jenis	9 Jenis	Persentase pemenuhan Jumlah Mebeleur yang diadakan	100 %	128.563.140	128.563.140	-
	1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	-	11.834.820	**11.834.820**
	1	**06**	**01**	**2.08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**					**Jumlah benda pos yang disediakan untuk surat menyurat**								**247.642.332**	**247.642.332**	**-**
	1	**06**	**01**	**2.08**	**01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Jumlah benda pos yang disediakan untuk surat menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan untuk surat menyurat	256 Lembar	256 Lembar	Persentase pemenuhan Jumlah benda pos yang disediakan untuk surat menyurat	100 %	2.472.000	2.472.000	-
	1	**06**	**01**	**2.08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Jumlah waktu penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Persentase pemenuhan Jumlah waktu penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	119.783.000	119.783.000	-
	1	**06**	**01**	**2.08**	**04**	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor							Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan	Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan	26 Jenis	26 Jenis	Persentase pemenuhan Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan	100 %	125.387.332	125.387.332	-
	1	**06**	**01**	**2.09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PEMERINTAH DAERAH**					**Jumlah kendaraan dinas perorangan/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar perizinannya**								**132.200.000**	**204.200.000**	**72.000.000**
	1	**06**	**01**	**2.09**	**01**	Penyedian Jasa Pemeliharan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas							Jumlah Kendaraan Dinas /Oprasional yang dibayar Perizinaannya	Jumlah Kendaraan Dinas /Oprasional yang dibayar Perizinaannya	10 Unit	10 Unit	Persentase pemenuhan Jumlah Kendaraan Dinas /Oprasional yang dibayar Perizinaannya	100 %	123.000.000	175.000.000	52.000.000
	1	**06**	**01**	**2.09**	**06**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya							Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	94 Unit	94 Unit	Persentase pemenuhan Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	100 %	9.200.000	29.200.000	20.000.000

						URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
	1	**06**	**02**			**URUSAN SOSIAL**	**pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**	**Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**											**5.252.265.029**	**5.425.495.469**	**173.230.440**
	1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					**Persentase PMKS yang tertangani**								**94.671.070**	**98.761.070**	**4.090.000**
	1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota**					**Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan**								94.671.070	98.761.070	**4.090.000**
	1	**06**	**02**	**2.03**	**02**	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota							Jumlah TKSK yang dibina	Jumlah TKSK yang dibina	16 Org	16 Org	Persentase pemenuhan Jumlah TKSK yang dibina	100 %	54.071.190	54.161.190	90.000
	1	**06**	**02**	**2.03**	**04**	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota							Jumlah Lembaga sosial yang dibina	Jumlah Lembaga sosial yang dibina	4 Lembga	4 Lembga	Persentase pemenuhan Jumlah Lembaga sosial yang dibina	100 %	40.599.880	44.599.880	4.000.000
	1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**					**Persentase penyelesaian warga negara migran korban tindak kekerasan**								**18.039.078**	**42.351.078**	24.312.000
	1	**06**	**03**	**2.01**		Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal					**Jumlah Warga Negara Migran yang di Fasilitasi**	2000 Org							18.039.078	42.351.078	
	1	**06**	**03**	**2.01**	**01**	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal							Jumlah Dokumen pemulangan warga negara migran yang tertangani	Jumlah Dokumen pemulangan warga negara migran yang tertangani	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen pemulangan warga negara migran yang tertangani	100 %	18.039.078	42.351.078	24.312.000
	1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					**Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**								**2.612.530.281**	**2.586.737.911**	(25.792.370)
	1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial**					**Persentase Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi.**								**2.612.530.281**	**2.586.737.911**	**(25.792.370)**
	1	**06**	**04**	**2.01**	**01**	Penyediaan Permakanan							Jumlah Lansia yang memperoleh bantuan permakanan	Jumlah Lansia yang memperoleh bantuan permakanan	292 Lansia	425 Lansia	Terpenuhinya Kebutuhan permakanan perorang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	1.040.727.720	1.040.727.720	-
	1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	Terpenuhinya Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	31.432.360	31.432.360	
	1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	Terpenuhinya kebutuhan Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	45.289.766	45.289.766	
	1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Terpenuhinya Kebutuhan Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	8.143.170	8.143.170	

	1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	Persentase Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	65.999.886	65.999.886	
	1	**06**	**04**	**2.01**	**06**	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis							Jumlah penyandang disabilitas, lansia terlantar dan ODGJ	Jumlah penyandang disabilitas, lansia terlantar dan ODGJ	1 Dok	500 Orang	Persentase pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas, lansia terlantar dan ODGJ	100 %	1.144.886.259	1.144.886.259	-
	1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Persentase Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	3.499.960	3.499.960	-
	1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	Persentase Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	65.999.489	65.999.489	-
	1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	4.252.870	4.252.870	-
	1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	3.290.000	3.290.000	-
	1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	Persentase Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	4.544.000	4.544.000	-
	1	**06**	**04**	**2.01**	**12**	Pemberian Layanan Rujukan							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Org	370 Org	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	194.464.801	168.672.431	(25.792.370)

	1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					**Cakupan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya**								**2.323.024.071**	**2.487.132.511**	164.108.440
	1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-anak Terlantar**					**Jumlah Panti Asuhan yang di Bina dalam Menyediakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial**								**235.998.969**	**252.468.969**	16.470.000
	1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-anak Terlantar							Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	Terpenuhinya Penjangkauan anak-anak terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	1.999.994	1.999.994	
	1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-anak Terlantar							Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	Terpenuhinya Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	1.999.332	1.999.332	
	1	**06**	**05**	**2.01**	**03**	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar							Jumlah panti asuhan yang dibina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah panti asuhan yang dibina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial	9 Panti/ LKSA	9 Panti/ LKSA	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	231.999.643	248.469.643	16.470.000
	1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**					**Tersedianya Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang Disusun**								**2.087.025.102**	**2.234.663.542**	**147.638.440**
	1	**06**	**05**	**2.02**	**01**	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	100 %	204.118.343	204.118.343	-
	1	**06**	**05**	**2.02**	**02**	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	100 %	20.208.291	22.548.291	2.340.000
	1	**06**	**05**	**2.02**	**03**	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan	Keluarga	Keluarga	Persentase pemenuhan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan	100 %	1.417.579.056	1.576.932.056	159.353.000
	1	**06**	**05**	**2.02**	**04**	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat							Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	6 KUBE	6 KUBE	Persentase pemenuhan Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	100 %	445.119.412	431.064.852	(14.054.560)

	1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					**Persentase korban bencana alam/non alam tertangani**	**100%**							**141.805.957**	**141.805.957**	-
	1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**					**Persentase Korban Bencana yang mendapat Bantuan.**	**100%**							**141.805.957**	**141.805.957**	-
	1	**06**	**06**	**2.01**	01	Penyediaan Makanan							Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam/Sosial yang menerima makanan yang disediakan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam/Sosial yang menerima makanan yang disediakan	300 Orang	300 Orang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	104.115.520	104.115.520	-
	1	**06**	**06**	**2.01**	02	Penyediaan Sandang							Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam/Sosial yang menerima Sandang yang disediakan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bencana Alam/Sosial yang menerima Sandang yang disediakan	300 Orang	300 Orang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	22.365.719	22.365.719	-
	1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi							Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	Tersedianya tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	6.065.041	6.065.041	
	1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	4.304.637	4.304.637	
	1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	Terpenuhinya Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	4.955.040	4.955.040	
	1	**06**				**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					**Peningkatan Pelestarian Taman Makam Pahlawan (TMP)/Monumen san Nilai Kepahlawanan**								**62.194.572**	**68.706.942**	
	1	**06**	**1**	**06**	**1**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**					**Peningkatan Pelestarian Taman Makam Pahlawan (TMP)/Monumen san Nilai Kepahlawanan**								**62.194.572**	**68.706.942**	**6.512.370**
	1	**06**	**1**	**06**	**02**	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							Jumlah Taman Makam Pahlawanan yang dipelihara	Jumlah Taman Makam Pahlawanan yang dipelihara	3 TMP	3 TMP	Terpenuhinya Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100 %	62.194.572	68.706.942	6.512.370

						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
						URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak											**2.290.007.885**	**2.349.970.671**	**59.962.786**
	2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**					**Tersedianya Data IPG dan IDG**										**1.474.476.421**	**1.516.476.287**	**41.999.866**
	2	**08**	**02**	**2.01**		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota					Tersedianya Data Pilah Gender dan Anak										**49.839.880**	**49.839.880**	-
	2	**08**	**02**	**2.01**	**03**	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG							Jumlah pertemuan penyusunan indikator APE	Jumlah pertemuan penyusunan indikator APE	3 PD	3 PD	Persentase pemenuhan Jumlah pertemuan penyusunan indikator APE	100 %	49.839.880	49.839.880	-
	2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota**					**Persentase Penyelesaian Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak**										**160.019.919**	**160.019.919**	**-**
	2	**08**	**02**	**2.02**	**01**	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi							Jumlah Peserta yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Org	20 Org	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	25.020.561	25.020.561	-
	2	**08**	**02**	**2.02**	**02**	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi							Jumlah kaum perempuan yang mengikuti pendidikan dasar hukum dan politik	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Org	70 Org	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	134.999.358	134.999.358	-
	2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota**					**Tersedianya Dokumen Kegiatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**										**1.264.616.622**	**1.306.616.488**	**41.999.866**
	2	**08**	**02**	**2.03**	**01**	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota							Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Lembaga	31 Lembaga	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	1.111.974.813	1.153.974.679	41.999.866
	2	**08**	**02**	**2.03**	**02**	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota							Jumlah pertemuan dan pembinaan dalam rangaka kegiatan KSI	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 Kali Pertemuan	200 Orang	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	36.307.913	36.307.913	-
	2	**08**	**02**	**2.03**	**03**	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota							Jumlah Kegiatan Hari Kartini dan Hari Ibu	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Kegiatan	2 Dok	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	116.333.896	116.333.896	-

	2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					**Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan**								**244.214.343**	**259.177.454**	14.963.111
	2	**08**	**03**	**2.01**		Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Sosialisasi / Peretemuan Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapat Kekerasan dalam Rumah Tangga								**130.716.484**	**130.716.484**	-
	2	**08**	**03**	**2.01**	**02**	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota							Jumlah sosialisasi / pertemuan perlindungan terhadap perempuan yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga	Jumlah sosialisasi / pertemuan perlindungan terhadap perempuan yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga	6 Keg	6 Keg	Persentase pemenuhan Jumlah sosialisasi / pertemuan perlindungan terhadap perempuan yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga	100 %	130.716.484	130.716.484	-
	2	**08**	**03**	**2.02**		Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota					Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani								**96.121.261**	**111.084.372**	14.963.111
	2	**08**	**03**	**2.02**	**01**	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota							Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani	Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani	25 Kasus	25 Kasus	Persentase pemenuhan Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani	100 %	96.121.261	111.084.372	14.963.111
	2	**08**	**03**	**2.03**		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota					Jumlah dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disusun								**17.376.598**	**17.376.598**	-
	2	**08**	**03**	**2.03**	**04**	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota							Jumlah Dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disepakati	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	1 Dok	1 Dok	Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	17.376.598	17.376.598	-

	2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**													**196.759.582**	**196.759.582**	
	2	**08**	**04**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**													**196.759.582**	**196.759.582**	
	2	08	05	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	96.759.851	96.759.851	-
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya melingkupi Kabupaten/Kota															
	2	08	05	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	Terpenuhinya sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	99.999.731	99.999.731	-
	2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**													**49.929.304**	**57.128.897**	7.199.593
	2	**08**	**05**	**2.01**		Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota					Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun								49.929.304	57.128.897	
	2	**08**	**05**	**2.01**	**01**	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota							Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun	Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun	2 Dok	2 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun	100 %	49.929.304	57.128.897	7.199.593

	2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**					**Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA**								**196.070.171**	**191.870.387**	(4.199.784)
	2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota**					**Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun**								**95.925.030**	**91.725.246**	(4.199.784)
	2	**08**	**06**	**2.01**	**02**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota							Jumlah Organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Haka Anak pada organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Haka Anak pada organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan Media dan Dunia Usaha	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Haka Anak pada organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan Media dan Dunia Usaha	100 %	95.925.030	91.725.246	(4.199.784)
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota.												**100.145.141**	**100.145.141**	
						Pengembangan Komunkiasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota.							Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100.145.141	100.145.141	
	2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					**Persentase Penanganan Kasus Anak yang tertangani**								**128.558.064**	**128.558.064**	-
	2	**08**	**07**	**2.01**		Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota					Jumlah desa yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak								**16.634.952**	**16.634.952**	-
	2	**08**	**07**	**2.01**	**02**	Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota							Jumlah desa yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah desa yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Desa	3 Desa	Persentase pemenuhan Jumlah desa yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	100 %	16.634.952	16.634.952	-
	2	**08**	**07**	**2.02**		Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota					Jumlah Kader PATBM yang dibentuk								**111.923.112**	**111.923.112**	-
	2	**08**	**07**	**2.02**	**01**	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Kader	12 Orang	Persentase pemenuhan Jumlah Kader PATBM yang dibentuk	100 %	111.923.112	111.923.112	-
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

	2	**14**				**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**													**6.681.130.019**	**6.681.130.019**	
	2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**													**324.625.142**	**324.625.142**	-
	2	**14**	**02**	**2.01**		Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian					Jumlah Dokumen Pengendalian Penduduk yang disusun								**34.045.228**	**34.045.228**	-
	2	**14**	**02**	**2.01**	**02**	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota							Jumlah Dokumen GDPK yang disusun	Jumlah Dokumen GDPK yang disusun	1 Dok	1 Dok	Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen GDPK yang disusun	100 %	12.483.948	12.483.948	-
	2	**14**	**02**	**2.01**	**20**	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana(Bangga Kencana)							Jumlah dokumen GDPK yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	Dok	1 Dok	Tersedianya Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	100 %	8.250.000	8.250.000	
	2	**14**	**02**	**2.01**	**21**	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal							jumlah Sekolah yang menjadi sekolah siaga kependudukan	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Sekolah	1 Dok	Tersedianya Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan	100 %	13.311.280	13.311.280	-
	2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**					**Jumlah Laporan Pengendalian Penduduk yang disusun**								**290.579.914**	**290.579.914**	**-**
	2	**14**	**02**	**2.02**	**09**	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2 Laporan	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100 %	65.989.750	65.989.750	-
	2	**14**	**02**	**2.02**	**12**	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan		Tersedianya Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		101.400.000	101.400.000	-
	2	**14**	**02**	**2.02**	**13**	Pengelolaan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							Jumlah Laporan pengendalian lapangan dan pelayanan KB yang disusun	Jumlah Laporan pengendalian lapangan dan pelayanan KB yang disusun	2 Dok	2 Dok	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100 %	117.994.774	117.994.774	-
	2	**14**	**02**	**2.02**	14	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK							Jumlah Faskes yang dibina	Jumlah Faskes yang dibina	33 Faskes	1 Lap	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	100 %	3.365.000	3.365.000	-
	2	**14**	**02**	**2.02**	18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana							Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	33 Lap	33 Lap	Tersedianya Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	100 %	1.830.390	1.830.390	-

	2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					**Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif**								**3.510.885.417**	**3.510.885.417**	-
	2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**					**Jumlah Sosialisasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB.**								**2.121.489.408**	**2.121.489.408**	-
	2	**14**	**03**	**2.01**	**08**	Pengendalian Program KKBPK							Jumlah Dokumen KKBPK yang disusun	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP	15 Kec	1 Laporan	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	100 %	677.499.680	677.499.680	
	2	**14**	**03**	**2.01**	**10**	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Media	1 Dok	Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	100 %	818.998.758	818.998.758	-
	2	**14**	**03**	**2.01**	**11**	Pelaksanaan Mekanisme Organisasi Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui	Rapat	Laporan	Tersedianya Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	100 %	225.000.000	225.000.000	-
	2	**14**	**03**	**2.01**	**12**	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media luar Ruang							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Desa	Laporan	Tersedianya Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		149.990.970	149.990.970	
	2	**14**	**03**	**2.01**	**14**	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dokumen	Laporan	Terpenuhinya Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100 %	250.000.000	250.000.000	-
	2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB**					**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang mendapat sarana Pendukung Operasional**								**507.000.000**	**507.000.000**	-
	2	**14**	**03**	**2.02**	**04**	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)							Jumlah Kader Penggerakan IMP	Jumlah Kader Penggerakan IMP	15 Org Kader	15 Org Kader	Persentase pemenuhan Jumlah Kader Penggerakan IMP	100 %	507.000.000	507.000.000	-

	2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi**					**Jumlah Faskes yang mendapat Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi**	**33 Faskes**							**463.921.429**	**463.921.429**	**-**
	2	**14**	**03**	**2.03**	**01**	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya							Jumlah Faskes, jejaring dan jaringannya yang mendapat distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alkon)	Jumlah Faskes, jejaring dan jaringannya yang mendapat distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alkon)	1 Laporan	1 Laporan	Persentase pemenuhan Jumlah Faskes, jejaring dan jaringannya yang mendapat distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alkon)	100 %	31.500.000	31.500.000	-
	2	**14**	**03**	**2.03**	**03**	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)							Jumlah kesertaan penggunaan MKJP	Jumlah kesertaan penggunaan MKJP	12.709 Orang	12.709 Orang	Persentase pemenuhan Jumlah kesertaan penggunaan MKJP	100 %	365.671.429	365.671.429	-
	2	**14**	**03**	**2.03**	**08**	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.							Jumlah Faskes yang Mendapat Pembinaan Pelayanan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100 %	66.750.000	66.750.000	
	2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**					**Jumlah Laporan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**								**418.474.580**	**418.474.580**	**-**
	2	14	03	2.04	01	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisai	3 Organisai	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 %	34.724.580	34.724.580	-
	2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2 Dok	2 Dok	Tersedianya Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	100 %	11.750.000	11.750.000	
	2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB							Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	32 Kampung KB	32 Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	100 %	372.000.000	372.000.000	-

	2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					**Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)**								**2.845.619.460**	**2.845.619.460**	-
	2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**					**Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapat pembinaan**								**378.058.318**	**378.058.318**	
	2	14	04	2.01	16	Pengolahan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kelompok	3 Lap	Tersedianya laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	100 %	28.800.000	28.800.000	-
	2	14	04	2.01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	1 Lap	Tersedianya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 %	35.144.687	35.144.687	
	2	14	04	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraaan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraaan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraaan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Desa	20 Unit	Tersedianya Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraaan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang	100 %	299.999.700	299.999.700	-
	2	14	04	2.01	28	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	7 Kelompok	12 Klmpk	Tersedianya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	100 %	14.113.931	14.113.931	
	2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**					**Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'**								**2.467.561.142**	**2.467.561.142**	-
	2	**14**	**04**	**2.02**	02	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							Jumlah Kader yang mendapatkan advokasi dari mitra kerja / organisasi kemasyarakatan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitrakerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Opersional Pembinaan Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIR R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	orang	1 Lap	Terlaksananya Pendayagunaan Mitrakerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Opersional Pembinaan Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIR R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	100 %	4.261.142	4.261.142	-
	2	**14**	**04**	**2.02**	06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stanting Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil Paska Salin/Kelahiran, Baduta, Balita)							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	orang	1173 Lap	Terpenuhinya Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	100 %	2.463.300.000	2.463.300.000	-

3.2 Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan dan Pagu Perubahan Anggaran Renja DINSOSP3AKB Tahun 2024

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Beencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program–program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau;
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

TABEL III.2

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU PERUBAHAN RENCANA KERJA DINSOSP3AKB TAHUN 2024

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU				JUMLAH PAGU BARU (Rp)	JUMLAH KEGIATAN BARU
		RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2024	APBD 2024	PENYEMPURNAAN APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
1	2	3			4			5				6	7
1	URUSAN SOSIAL	7	7		16	16		9.487.779.342	9.487.779.342	11.113.096.861	11.619.686.155	506.589.294	
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	6		11	12		2.290.007.885	2.290.007.885	2.290.007.885	2.349.970.671	59.962.786	
3	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELURAGA BERENCANA	3	3		7	7		6.083.630.339	6.083.630.339	6.681.130.190	6.681.130.190	-	
	JUMLAH	15	16		34	35		17.861.417.566	17.861.417.566	20.084.234.936	20.650.787.016	566.552.080	

3. 3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana Strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan,visi dan Misi.

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memprogramkan beberapa kegiatan yaitu:

TABEL 3.3
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINSOSP3AKB KAB.SANGGAU TAHUN 2024

Kode Rekening					Menjadi	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
							RENJA 2024	RENJA Perubahan 2024	RENJA 2024	RENJA Perubahan 2024	
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indikator Program : Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau**	**100%**	**100%**	**5.860.831.832**	**6.194.190.686**	
1	**06**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**13 Dok**	**13 Dok**	**48.844.731**	**51.352.587**	
						Sasaran : Dokumen Renja, Renja Perubahan, Perubahan Renstra, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, LAKIP, RKT, TAPKIN, SPIP dan Rencana Aksi Dinsosp3akb Kab.Sanggau					
1	**06**	**01**	**2.01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Keluaran : JJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Daerah yang Disusun	3 Dok	3 Dok	6.868.201	6.868.201	
						Indikator Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah					
1	**06**	**1**	**2.01**	**02**	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	24.218.960	24.218.960	
						Indikator Hasil : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
1	**06**	**1**	**2.01**	**03**	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun Sebanyak 1 dokumen	1 Dok	1 Dok	2.861.580	2.861.580	
						Indikator Hasil : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan SKPD yang disusun					

1	**06**	**1**	**2.01**	**04**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indikator keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	2.947.050	2.947.050	
						Indikator Hasil : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD disusun Sebanyak 1 Dokumen					
1	**06**	**1**	**2.01**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Sebanyak 1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	2.167.830	4.637.136	
						Indikator Hasil : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					
1	**06**	**1**	**2.01**	**06**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD dan SPIP yang disusun Sebanyak 2 Dokumen	2 Dok	2 Dok	3.530.100	4.637.136	
						Indikator Hasil :Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
1	**06**	**1**	**2.01**	**07**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sebanyak 4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	6.251.010	6.251.010	
						Indikator Hasil : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sebanyak 4 Dokumen					

1	**06**	**1**	**2.02**		**Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah**	**Sasaran :Gaji dan Tunjangan ASN, Tunjangan Kinerja ASN, Pelaksanaan Verifikasi, Pelaksanaan Akuntanasi dan SPJ, Laporan Keuangan Akhir Tahun,LHP, Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Prognosis realisasi Anggaran Dinsosp3akb Kab. Sanggau**	**39 Orang**	**39 Orang**	**4.836.928.150**	**4.967.740.604**	**130.812.454**
						Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					
1	**06**	**1**	**2.02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	3.056.232.548	3.056.232.548	
						Indikator Hasil : Persentase Laporan Jumlah Laporan Pelaksana Tugas ASN yang disusun					
1	**06**	**1**	**2.02**	**02**	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	12 Bulan	12 Bulan	1.531.563.514	1.649.376.092	
						Indikator Hasil : Persentase Laporan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi					
1	**06**	**1**	**2.02**	**03**	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksana Tugas ASN yang disusun	1 Dok	1 Dok	179.359.161	179.359.161	
						Indikator Hasil : Persentase Laporan Jumlah Laporan Pelaksana Tugas ASN yang disusun					
1	**06**	**1**	**2.02**	**04**	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	1 Dok	1 Dok	50.199.720	63.199.596	
						Indikator Hasil : Persentase Laporan Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun					

1	06	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indikator Keluaran :Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	1 Dok	1 Dok	2.975.555	2.975.555	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun					
1	06	1	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	1 Dok	1 Dok	9.789.401	9.789.401	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun					
1	06	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun	1 Dok	1 Dok	5.081.269	5.081.269	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disusun					
1	06	1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun	2 Dok	2 Dok	1.726.982	1.726.982	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun					

1	**06**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**					
						Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau			**29.190.599**	**34.603.736**	5.413.137
1	**06**	**1**	**2.03**	**01**	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang disusun	2 Dok	2 Dok	6.012.537	11.425.674	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang disusun					
1	**06**	**1**	**2.03**	**02**	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah yang disusun	2 Dok	2 Dok	9.019.112	9.019.112	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Laporan pengamanan barang milik daerah yang disusun					
1	**06**	**1**	**2.03**	**06**	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	3 Dok	3 Dok	14.158.950	14.158.950	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun					
1	**06**	**1**	**2.05**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Sasaran : PNS dan Non PNS DINSOSP3AKB**	**63 Stel**	**63 Stel**	-	-	
						Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur					
1	**06**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah**	Indikator Keluaran : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai			**22.695.435**	**41.243.022**	18.547.587
1	**06**	**1**	**2.05**	**03**	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun	2 Dok	2 Dok	5.133.084	5.133.084	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun					
1	**06**	**1**	**2.05**	**04**	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Indikator Keluaran :Jumlah Dokumen profil ASN Dinsosp3akab yang disusun	1 Dok	1 Dok	6.615.770	13.141.541	
						Indikator Hasil :Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen profil ASN Dinsosp3akab yang disusun					

1	**06**	**1**	**2.05**	**05**	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang disusun	1 Dok	1 Dok	6.849.979	13.114.189	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Laporan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang disusun					
1	**06**	**1**	**2.05**	**10**	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	35 Orang	4.096.602	9.854.208	
						Indikator Hasil : Terpenuhinya orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					
1	**06**	**1**	**2.06**		**ADMNISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau			**250.967.445**	**343.210.445**	**92.243.000**
						Indikator Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	22 Jenis	22 Jenis			
1	**06**	**01**	**2.06**	**01**	Penyedian Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Keluaran : Jumlah Alat Listrik dan elektronik yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	9.971.130	9.971.130	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Alat Listrik dan elektronik yang disediakan					
1	**06**	**01**	**2.06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Keluaran :Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	83.840.520	83.840.520	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					

1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator Keluaran : Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	30.902.400	30.902.400	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan					
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indikator Keluaran :Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	28.518.786	28.518.786	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan					
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Indikator Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3352 Eksemplar	3352 Eksemplar	9.534.000	9.534.000	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					
1	06	01	2.06	07	Penyediaan bahan / Material	Indikator Keluaran : Jumlah BBM yang disediakan	4148 Liter	1060 Liter	24.115.000	25.106.000	991.000
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah BBM yang disediakan					
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator Keluaran : Jumlah laporan kunjungan tamu	12 Lap	12 Lap	3.600.000	4.500.000	900.000
						Indikator Hasil : Tersedianya laporan kunjungan tamu					
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Keluaran :Jumlah Perjalanan Dinas ke luar Daerah	192 OH	200 OH	46.425.000	136.777.000	penambahan anggaran sebesar Rp. 197.355.00,- dikarenakan hasil evaluasi perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon II dan Eselon III Eselon IV, staf dan Tenaga Kontrak hingga pertengahan tahun sudah terserap sehingga membutuhkan penambahan anggaran hingga akhir tahun.
						Indikator Hasil :Jumlah Perjalanan Dinas ke luar Daerah					
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indikator Keluaran :Jumlah Arsip Sekretariat dan Bidang yang disusun	5 Dok	5 Dok	8.430.209	8.430.209	
						Indikator Hasil :Persentase pemenuhan Jumlah Arsip Sekretariat dan Bidang yang disusun					
1	06	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dok	2 Dok	5.630.400	5.630.400	
						Indikator Hasil : Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					

1	**06**	**01**	**2.07**	**1**	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang diadakan**			**292.363.140**	**304.197.960**	11.834.820
						Sasaran :Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau					
1	**06**	**01**	**2.07**	**05**	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	163.800.000	163.800.000	
						Indikator Hasil : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
1	**06**	**01**	**2.07**	**05**	Pengadaan Mebel	Indikator Keluaran : Jumlah Mebeleur yang diadakan	9 Jenis	9 Jenis	128.563.140	128.563.140	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Mebeleur yang diadakan					
1	**06**	**01**	**2.07**	**06**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	-	11.834.820	
						Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					

1	**06**	**01**	**2.08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Indikator Keluaran :Jumlah benda pos yang disediakan untuk surat menyurat**			**247.642.332**	**247.642.332**	-
						Sasaran :Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau					
1	**06**	**01**	**2.08**	**01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.472.000	2.472.000	
						Indikator Hasil :Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
1	**06**	**01**	**2.08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	119.783.000	119.783.000	
						Indikator Hasil : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
1	**06**	**01**	**2.08**	**04**	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan	26 Laporan	125.387.332	125.387.332	
						Indikator Hasil : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor					
1	**06**	**01**	**2.09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Indikator Keluaran : Jumlah kendaraan dinas perorangan/kendaaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar perizinannya**			**132.200.000**	**204.200.000**	**72.000.000**
						Sasaran :Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau					
1	**06**	**01**	**2.09**	**01**	Penyedian Jasa Pemeliharan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Indikator Keluaran :Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	10 Unit	10 Unit	123.000.000	175.000.000	Penambahan anggaran sebesar Rp. 213.000.000,- dikarenakan pada anggaran murni biaya pajak kendaraan tidak cukup untuk membiayai masing-masing kendaraan operasional yang ada pada Dinsosp3kb. Serta Mobil Double Gardan yang biasa utk distribusi bantuan Bencana mengalami rusak berat serta pemeliharaan utk Truck Sosial.
						Indikator Hasil : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
1	**06**	**01**	**2.09**	**06**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	94 Unit	9.200.000	29.200.000	Penambahan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dikarenakan pada anggaran murni untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya tdk mencukupi hingga akhir tahun sedangkan pemeliharaan barang semakin banyak.
						Indikator Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

1	**06**	**02**			**URUSAN SOSIAL**	**Indikator Program : pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**	**100%**	**100%**	**5.252.265.029**	**5.409.025.469**	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Indikator Program : Persentase PMKS yang tertangani**	**100%**	**100%**	**94.671.070**	**98.761.070**	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota**	Indikator Kegiatan : Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan			94.671.070	98.761.070	
						Sasaran : Tenaga Kesejahteraaan Sosial Kecamatan (TKSK), LK3, LLI, Lembaga Sosial					
1	**06**	**02**	**2.03**	**02**	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah TKSK yang dibina	16 Org	16 Org	54.071.190	54.161.190	Penambahan Anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- yang akan dipergunakan untuk pembayaran kekurangan Tali Asih TKSK selama 6 bulan
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah TKSK yang dibina					
1	**06**	**02**	**2.03**	**04**	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga sosial yang dibina	4 Lembaga	4 Lembaga	40.599.880	44.599.880	Penambahan anggaran sebesar Rp. 13.600.000,- yang akan dipergunakan untuk Sewa Aula, Narasumber dan unag saku kegiatan Karang Taruna.
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Lembaga sosial yang dibina					
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Indikator Kegiatan : Persentase penyelesaian warga negara migran korban tindak kekerasan			**18.039.078**	**42.351.078**	
1	**06**	**03**	**2.01**		**Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal**	**Indikator Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran yang di Fasilitasi**	**2000 Org**	**2000 Org**	**18.039.078**	**42.351.078**	**24.312.000**
						Sasaran : Warga Migran					
1	**06**	**03**	**2.01**		Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen pemulangan warga negara migran yang tertangani	1 Dok	1 Dok	18.039.078	42.351.078	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen pemulangan warga negara migran yang tertangani					

1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Indikator Kegiatan : Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			**2.612.530.281**	**2.586.737.911**	
						Sasaran : Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas dan ODGJ					
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial**	Indikator Kegiatan : Persentase Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi.			**2.612.530.281**	**2.586.737.911**	- **25.792.370**
1	**06**	**04**	**2.01**	**01**	Penyediaan Permakanan	Indikator Keluaran : Jumlah Lansia yang memperoleh bantuan permakanan	425 Lansia	425 Lansia	1.040.727.720	1.040.727.720	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Lansia yang memperoleh bantuan permakanan					
1	**06**	**04**	**2.01**	**02**	Penyediaan Sandang	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	31.432.360	31.432.360	
						Indikator Hasil : Terpenuhinya Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	**06**	**04**	**2.01**	**03**	Penyediaan Alat Bantu	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	45.289.766	45.289.766	
						Indikator Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	**06**	**04**	**2.01**	**04**	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	8.143.170	8.143.170	
						Indikator Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	**06**	**04**	**2.01**	**05**	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	65.999.886	65.999.886	
						Indikator Hasil : Persentase Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					

1	06	04	2.01	06	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat	Indikator Keluaran : Jumlah penyandang disabilitas, lansia terlantar dan ODGJ	500 Orang	500 Orang	1.144.886.259	1.144.886.259	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas, lansia terlantar dan ODGJ					
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	3.499.960	3.499.960	
						Indikator Hasil :Persentase Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	65.999.489	65.999.489	
						Indikator Hasil : Persentase Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	4.252.870	4.252.870	
						Indikator Hasil : Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Indikator Keluaran :Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	3.290.000	3.290.000	
						Indikator Hasil : Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	4.544.000	4.544.000	
						Indikator Hasil : Persentase Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Indikator Keluaran : Jumlah Penyandang Disabilitas/ODGJ yang tertangani	370 ODGJ	370 ODGJ	194.464.801	168.672.431	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Penyandang Disabilitas/ODGJ yang tertangani					

1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Indikator Kegiatan : Cakupan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya			**2.323.024.071**	**2.470.662.511**	
						Sasaran : Anak Terlantar dan Penduduk Miskin					
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-anak terlantar**	Indikator Kegiatan : Jumlah Panti Asuhan yang di Bina dalam Menyediakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial			**235.998.969**	**235.998.969**	**-**
1	**06**	**05**	**2.01**	**01**	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Indikator Keluaran : Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	1.999.994	1.999.994	
						Indikator Hasil : Terpenuhinya Penjangkauan anak-anak terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	**06**	**05**	**2.01**	**02**	Rujukan Anak-anak Terlantar	Indikator Keluaran : Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	1.999.332	1.999.332	
						Indikator Hasil : Terpenuhinya Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	**06**	**05**	**2.01**	**03**	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Indikator Keluaran : Jumlah panti asuhan yang dibina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial	9 Panti Asuhan	9 Panti Asuhan	231.999.643	231.999.643	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah panti asuhan yang dibina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial					

1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Indikator Kegiatan : Tersedianya Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang Disusun			**2.087.025.102**	**2.234.663.542**	
1	**06**	**05**	**2.02**	**01**	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran :Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dok	1 Dok	204.118.343	204.118.343	Penambahan anggaran sebesar Rp. 41.985.000,- yang akan dipergunakan untuk biaya penginputan 600 lembar dan Bintek Aplikasi DTKS ke Jakarta
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun					
1	**06**	**05**	**2.02**	**02**	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran :Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dok	1 Dok	20.208.291	22.548.291	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun					
1	**06**	**05**	**2.02**	**03**	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan	5 Jenis Bantuan	5 Jenis Bantuan	1.417.579.056	1.576.932.056	Penamabahan Anggaran sebesar Rp. 25.550.000,- yang akan dipergunakan untuk Sewa Aula, Narasumber, Makan Minum dan Unag Saku Kegiatan TKSK dan PKH
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan					
1	**06**	**05**	**2.02**	**04**	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	6 Kube	6 Kube	445.119.412	431.064.852	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan					

1	06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Indikator Kegiatan : Persentase korban bencana alam/non alam tertangani			**141.805.957**	**141.805.957**	-
						Sasaran : Korban Bencana Alam dan Sosial					
1	06	06	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Indikator Kegiatan : Persentase Korban Bencana yang mendapat Bantuan.			**141.805.957**	**141.805.957**	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Indikator Keluaran : Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	75 Org	75 Org	104.115.520	104.115.520	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan					
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Indikator Keluaran : Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	75 Org	75 Org	22.365.719	22.365.719	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan					
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Indikator Keluaran : Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	6.065.041	6.065.041	
						Indikator Hasil : Tersedianya tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	4.304.637	4.304.637	
						Indikator Hasil : Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	4.955.040	4.955.040	
						Indikator Hasil : Terpenuhinya Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	06	07			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Indikator Kegiatan : Peningkatan Pelestarian Taman Makam Pahlawan (TMP)/Monumen san Nilai Kepahlawanan			**62.194.572**	**68.706.942**	**6.512.370**
						Sasaran : 3 TMP'					
1	06	07	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Indikator Kegiatan : Persentase Taman Makam Pahlawan yang mendapatkan Pemeliharaan	3 TMP	3 TMP	**62.194.572**	**68.706.942**	**6.512.370**
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Jumlah Taman Makam Pahlawanan yang dipelihara	3 TMP	3 TMP	62.194.572	68.706.942	6.512.370
						Indikator Hasil : Terpenuhinya Taman Makam Pahlawan yang dipelihara					

2					**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak			**2.093.248.303**	**2.269.577.273**	176.328.970
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Tersedianya Data IPG dan IDG			**1.474.476.421**	**1.516.476.287**	
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Data IPG dan IDG**			**49.839.880**	**49.839.880**	
						Sasaran : Perempuan dan Lembaga					
2	**08**	**02**	**2.01**	**03**	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Indikator Keluaran : Jumlah pertemuan penyusunan indikator APE	3 Pertemuan	3 Pertemuan	49.839.880	49.839.880	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah pertemuan penyusunan indikator APE					
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Sosialisasi / Peretemuan Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapat Kekerasan dalam Rumah Tangga			**160.019.919**	**160.019.919**	
2	08	02	2.02	**01**	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Org	20 Org	25.020.561	25.020.561	
						Indikator Hasil : Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					
2	08	02	2.02	**02**	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi	Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Org	70 Org	134.999.358	134.999.358	
						Indikator Hasil : Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					

2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota**	Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Kegiatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan			**1.264.616.622**	**1.306.616.488**	
2	**08**	**02**	**2.03**	**01**	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Lembaga	31 Lembaga	1.111.974.813	1.153.974.679	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina					
2	**08**	**02**	**2.03**	**02**	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 orang	200 orang	36.307.913	36.307.913	
						Indikator Hasil : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					
2	**08**	**02**	**2.03**	**03**	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dok	2 Dok	116.333.896	116.333.896	
						Indikator Hasil : Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan	100%	100%	**244.214.343**	**259.177.454**	
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyelesaian Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak			**130.716.484**	**130.716.484**	-
2	08	03	2.01	**02**	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah sosialisasi / pertemuan perlindungan terhadap perempuan yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga	6 Keg	6 Keg	130.716.484	130.716.484	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah sosialisasi / pertemuan perlindungan terhadap perempuan yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga					

2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota**	**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani**			**96.121.261**	**111.084.372**	14.963.111
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani	25 Kasus	25 Kasus	96.121.261	111.084.372	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani					
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disusun**			**17.376.598**	**17.376.598**	-
2	**08**	**03**	**2.03**	**04**	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	1 Dok	1 Dok	**17.376.598**	**17.376.598**	
						Indikator Hasil : Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan					
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase (%) Peningkatan Kualitas Keluarga yang terpenuhi dalam 2 (dua) Tahun**	**100%**	**100%**	**196.759.582**	**196.759.582**	
2	**08**	**04**	**2.01**		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase (%) Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun**	**100%**	**100%**	96.759.851	96.759.851	
2	**08**	**04**	**2.01**	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	96.759.851	96.759.851	
2	**08**	**04**	**2.02**		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya melingkupi Kabupaten/Kota	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	**100%**	**100%**	99.999.731	99.999.731	
2	**08**	**04**	**2.02**	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	99.999.731	99.999.731	

2	**08**	**05**	**2.01**		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun**			**49.929.304**	**57.128.897**	
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun**			**49.929.304**	**57.128.897**	
2	**08**	**05**	**2.01**	**01**	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun	2 Dok	2 Dok	49.929.304	57.128.897	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun					
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA**			**196.070.171**	**308.236.571**	**112.166.400**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan**	**Indikator Keluaran :Jumlah Dokumen Pencapaian Indikator Kabupaten Layak anak yang disusun**	**1 Dok**	**1 Dok**	**95.925.030**	**208.091.430**	
2	**08**	**06**	**2.01**	**02**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota	Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Haka Anak pada organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan Media dan Dunia Usaha	1 Dok	1 Dok	95.925.030	208.091.430	112.166.400
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Haka Anak pada organisasi Pemerintahan, Non Pemerintahan Media dan Dunia Usaha					
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak**			**100.145.141**	**100.145.141**	-
2	**08**	**06**	**2.02**	**03**	Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100.145.141	100.145.141	
						Indikator Hasil : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					

2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Penanganan Kasus Anak yang tertangani**			**128.558.064**	**128.558.064**	
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota**	**Indikator Keluaran :Jumlah desa yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak**			**16.634.952**	**16.634.952**	
2	**08**	**07**	**2.01**	**02**	Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Jumlah desa yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Desa	3 Desa	16.634.952	16.634.952	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah desa yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak					
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota**	**Indikator Keluaran :Jumlah Kader PATBM yang dibentuk**			**111.923.112**	**111.923.112**	
2	**08**	**07**	**2.02**	**01**	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Kader	12 Kader	111.923.112	111.923.112	
						Indikator Hasil : PersentaseJumlah AMPK yang mendapatkan layanan					

2	**14**				**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**6.667.016.088**	**6.667.016.088**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Sasaran : OPD Lintas Sektor Terkait**			**324.625.142**	**324.625.142**	
						Indikator Keluaran : Laporan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga					
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengendalian Penduduk yang disusun**			**34.045.228**	**34.045.228**	
2	**14**	**02**	**2.01**	**09**	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Lap	1 Lap	12.483.948	12.483.948	
						Indikator Hasil : Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					
2	**14**	**02**	**2.01**	**20**	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana(Bangga Kencana)	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	1 Dok	1 Dok	8.250.000	8.250.000	
						Indikator Hasil : Tersedianya Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)					
2	**14**	**02**	**2.01**	**21**	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Dok	1 Dok	13.311.280	13.311.280	
						Indikator Hasil :Tersedianya Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal					

2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Penduduk yang disusun			**290.579.914**	**290.579.914**	
2	**14**	**02**	**2.02**	**09**	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Indikator Keluaran :Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Lap	1 Lap	65.989.750	65.989.750	
						Indikator Hasil : Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					
2	**14**	**02**	**2.02**	**12**	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Indikator Keluaran :Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	15 Kec	15 Kec	101.400.000	101.400.000	
						Indikator Hasil : Tersedianya Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					
2	**14**	**02**	**2.02**	**13**	Pengelolaan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan pengendalian lapangan dan pelayanan KB yang disusun	20 Org	20 Org	117.994.774	117.994.774	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Laporan pengendalian lapangan dan pelayanan KB yang disusun					
2	**14**	**02**	**2.02**	**14**	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Indikator Keluaran :Jumlah Faskes yang dibina	1 Lap	1 Lap	3.365.000	3.365.000	
						Indikator Hasil :Persentase pemenuhan Jumlah Faskes yang dibina					
2	**14**	**02**	**2.02**	**18**	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	33 Lap	33 Lap	1.830.390	1.830.390	
						Indikator Hasil :Tersedianya Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana					

2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Indikator Keluaran : Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif			**3.510.885.417**	**3.510.885.417**	
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**	**Indikator Keluaran : Jumlah Sosialisasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB.**			**2.121.489.408**	**2.121.489.408**	
2	**#**	**03**	**2.01**	**08**	Pengendalian Program KKBPK	Indikator keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP	1 Laporan	1 Laporan	677.499.680	677.499.680	
						Indikator Hasil : Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK					
2	**14**	**03**	**2.01**	**10**	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Indikator keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Lap	1 Lap	818.998.758	818.998.758	
						Indikator Hasil : Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					
2	**14**	**03**	**2.01**	**11**	Pelaksanaan Mekanisme Organisasi Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Indikator keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Lap	1 Lap	225.000.000	225.000.000	
						Indikator Hasil : Tersedianya Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					
2	**14**	**03**	**2.01**	**12**	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media luar Ruang	Indikator keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Lap	1 Lap	149.990.970	149.990.970	
						Indikator Hasil : Tersedianya Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					
2	**14**	**03**	**2.01**	**14**	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Indikator keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Lap	1 Lap	250.000.000	250.000.000	
						Indikator Hasil : Terpenuhinya Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					

14	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB**	**Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang mendapat sarana Pendukung Operasional**			**507.000.000**	**507.000.000**	
14	**03**	**2.02**	**04**	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Indikator keluaran : Jumlah Kader Penggerakan IMP	15 Org Kader	15 Org Kader	507.000.000	507.000.000	
					Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Kader Penggerakan IMP					
14	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi**	Jumlah Faskes yang mendapat Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	33 Faskes		**463.921.429**	**463.921.429**	
14	**03**	**2.03**	**01**	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Indikator keluaran : Jumlah Faskes, jejaring dan jaringannya yang mendapat distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alkon)	1 Laporan	1 Laporan	31.500.000	31.500.000	
					Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah Faskes, jejaring dan jaringannya yang mendapat distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alkon)					
14	**03**	**2.03**	**03**	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)	Indikator keluaran : Jumlah kesertaan penggunaan MKJP	12.709 Akseptor	12.709 Akseptor	365.671.429	365.671.429	
					Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah kesertaan penggunaan MKJP					
14	**03**	**2.03**	**08**	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Indikator keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Kec	15 Kec	66.750.000	66.750.000	
					Indikator Hasil :Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					

2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**	**Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**			**418.474.580**	**418.474.580**	
2	**14**	**03**	**2.04**	**01**	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Indikator keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisa	3 Organisasi	34.724.580	34.724.580	
						Indikator Hasil : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
2	**14**	**03**	**2.04**	**02**	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2 Dok	2 Dok	11.750.000	11.750.000	
						Tersedianya Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					
2	**14**	**03**	**2.04**	**03**	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Indikator keluaran : Jumlah cakupan pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	1 Dok	1 Dok	372.000.000	372.000.000	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah cakupan pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB					

2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Indikator Keluaran : Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)**			**2.831.505.529**	**2.831.505.529**	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapat pembinaan**			**363.944.387**	**363.944.387**	
						Sasaran : Kelompok Tribina					
2	**14**	**04**	**2.01**	**16**	Pengolahan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3 Lap	3 Lap	28.800.000	28.800.000	
						Tersedianya laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					
2	**14**	**04**	**2.01**	**17**	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Indikator keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Lap	1 Lap	35.144.687	35.144.687	
						Indikator Hasil : Tersedianya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					
2	**14**	**04**	**2.01**	**18**	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Indikator keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	12 Klmpk	12 Klmpk	299.999.700	299.999.700	
						Indikator Hasil : Tersedianya Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia					
2	**14**	**04**	**2.01**	**28**	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			14.113.931	14.113.931	
						Tersedianya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)					

2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Indikator Keluaran : Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'**			**2.467.561.142**	**2.467.561.142**	
2	**14**	**04**	**2.02**	**02**	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indikator keluaran : Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan	60 Org	60 Org	4.261.142	4.261.142	
						Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'					
2	**14**	**04**	**2.02**	**06**	Pendampingan Keluarga Berisiko Stanting Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil Paska Salin/Kelahiran, Baduta, Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1173 Lap	1173 Lap	2.463.300.000	2.463.300.000	
						Terpenuhinya Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan					
									19.873.361.252	20.539.809.516	**566.552.080**

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, merupakan dokumen perencanan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2024. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Sanggau secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau secara khusus maka Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Substansi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan mempedomani Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Substansi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau 2019–

2024 2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau atas proses Penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan. 3. Bidang – bidang dan semua unsur teknis pelaksanan kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, agar segera menyusun rencana kinerja masing–masing dengan mengacu pada jenjang telah ditetapkan. 4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran. Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.